

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA**

**Disusun Oleh :
AYU ANITA SARI
NPM. 1901071010**



**Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2023**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan

Disusun oleh :
AYU ANITA SARI
NPM.1901071010

Pembimbing : Dr. Tusriyanto, M. Pd.

**Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2023**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA

Nama : Ayu Anita Sari

NPM : 1901071010

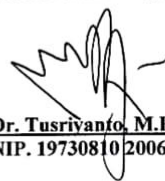
Program Studi : Tadris IPS

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 24 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Tusriyanto, M.Pd
NIP. 19730810 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725), Faksimih (0725) 47296, Website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Metro

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah di susun oleh :

Nama mahasiswa : Ayu Anita Sari
NPM : 1901071010
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Tadris IPS
Yang berjudul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wasalamualaikum Warahmtullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Tadris IPS


Tubagus Ak Rachman Puja Kesuma, M.Pd
NIP. 19870208 201503 1 002

Metro, 24 Mei 2023
Dosen Pembimbing,


Dr. Tusriyanto, M.Pd
NIP. 19730810 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id, e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: B-3532/1h-28.1/D/PP-00-9/06/2023

Skripsi dengan judul: ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA, di susun oleh: AYU ANITA SARI, NPM. 1901071010, Jurusan: Tadris IPS telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada hari/tanggal: Rabu/14 Juni 2023

TIM PENGUJI

Penguji 1 : Dr. Tusriyanto, M.Pd.

Penguji 2 : Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.

Penguji 3 : Karsiwan, M.Pd.

Penguji 4 : Atik Purwasih, M.Pd.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Zuhairi, M.Pd.
NIP. 19620612 198903 1 006

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA

Oleh:

**AYU ANITA SARI
NPM. 1901071010**

Dalam pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam anggaran dana yang didapatkan dari Pemerintah Pusat ini, pemerintah Desa wajib memperhatikan asas-asas tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Waringin Jaya di bidang pembangunan sarana prasarana lingkungan. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu masyarakat mempunyai perspektif negatif mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan khususnya sarana prasarana lingkungan di Desa Waringin Jaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian. Teknik untuk menganalisis data yaitu dengan melalui tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Bentuk transparansi dari pengelolaan Dana Desa di Desa Waringin Jaya yaitu dengan adanya prasasti-prasasti dalam setiap pembangunan yang dibangun menggunakan Dana Desa. Kemudian bentuk partisipatif dari pengelolaan tersebut yaitu sebelum adanya Musyawarah Rencana Bangunan Desa (MusRenBangDes), dilakukan Musyawarah Dusun (MusDus) yang dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan Desa. Sedangkan bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan Dana Desa yaitu dengan adanya laporan mengenai pendapatan Desa, bentuk pembiayaan belanja Desa, serta dana yang sudah digunakan dalam pembangunan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN DEVELOPMENT IMPLEMENTATION IN WARINGIN JAYA VILLAGE

By:

**AYU ANITA SARI
NPM. 1901071010**

The management of village finances must be based on transparent, accountable, participatory principles and be carried out in an orderly and budgetary manner. In the budget funds obtained from the Central Government, the village government must pay attention to these principles. The purpose of this study is to find out and analyze the management of village funds in Waringin Jaya Village in the field of environmental infrastructure development. The problem in this study is that the community has a negative perspective regarding the management of the Village Fund in the implementation of development, especially environmental infrastructure in Waringin Jaya Village.

The type of research used is field research with a descriptive qualitative approach. The data collection methodology used in this study is observation, documentation, and interviews. The primary data sources in this study are the Village Head, Village Secretary, community leaders, and the community. Meanwhile, secondary data sources were obtained from documentation obtained from research results. The technique for analyzing data is by going through three stages, namely: 1) data reduction, 2) data presentation, and 3) drawing conclusions or verification. To ensure the validity of the data using triangulation, namely source triangulation and method triangulation.

Based on the results of research on Village Fund management (DD) on the implementation of development in the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages, it is quite good, transparent, participatory and accountable. The form of transparency in the management of the Village Fund in Waringin Jaya Village is the existence of inscriptions on every development that is built using the Village Fund. Then the participatory form of management, namely before the Village Building Planning Consultation (MusRenBangDes), a Hamlet Meeting (MusDus) was held in which the community's aspirations regarding Village development were conveyed. Meanwhile, the form of accountability in the management of Village Funds is the existence of reports on Village revenues, forms of financing Village expenditures, and funds that have been used in development..

Keywords: Management, Village Fund, Development

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Anita Sari
NPM : 1901071010
Program Studi : Tadris IPS
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwasannya penyusunan skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya secara asli kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka skripsi ini.

Metro, 23 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Ayu Anita Sari
NPM. 1901071010

MOTTO

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Anfal: 46)¹

“Jika Orangtuamu lulusan SD, minimal kamu lulusan SMP. Jika Orangtuamu
lulusan SMP, minimal kamu lulus SMA. Jika Orangtuamu lulusan SMA, minimal
kamu lulus Strata 1”

(Lulut Handoko / Guru SMA Peneliti)

¹ *QS. Anfal Ayat 8:46*, n.d.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sumarno dan Ibu Romiatin. Tiada kata yang mampu menggantikan segala sayang, usaha untuk berjuang membiayai Pendidikanku selama ini, selalu memberiku semangat, dan juga do'a terbaik yang tiada hentinya
2. Kakak pertamaku tercinta, Feri Supriyanto yang selalu mendo'akan dan selalu memberi dukungan hingga aku dapat menyelesaikan tugas akhir ini
3. Almarhumah Kakakku Lasmi dan Almarhumah Kakakku Laras yang mengharapkan keberhasilan adik bungsunya, selalu hadir dimimpiku untuk memberiku motivasi dan juga semangat
4. Kakak Iparku Nena Damayanti dan Adik-Adik Keponakan ku tersayang Ghalih Diva Alqiovan dan Vita Oktaviana Alfena yang selalu memberi semangat
5. Rio Ferdiansyah yang selalu setia membantuku demi kelancaran tugas akhir ini.

Hanya sebuah karya sederhana yang dapat saya persembahkan untuk semuanya, terimakasih sudah memberikan dukungan, maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. *Jazzakumullah Khairan Katsiran*, semoga Allah membalas dengan penuh kebaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuasaan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya**”. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi sauri tauladan dalam setiap sikap dan tindakan sebagai seorang intelektual muslim.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar S.Pd. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
2. Dr. Zuhairi, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
3. Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
4. Dr. Tusriyanto, M.Pd. selaku dosen pembimbing
5. Bapak Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama melakukan studi di Institut Agama Islam Negeri Metro.
6. Kepala Desa dan Aparatur Desa Waringin Jaya
7. Desaku tercinta, Desa Waringin Jaya serta Masyarakat yang mendukung penelitian ini guna menyelesaikan tugas akhir
8. Semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan-bantuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini hingga selesai. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Metro, 19 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ayu Anita Sari', enclosed within a circular scribble.

Ayu Anita Sari
1901071010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengelolaan.....	11
1. Pengertian Pengelolaan.....	11
2. Elemen Dasar Pengelolaan.....	12
3. Teori Pengelolaan.....	13
B. Dana Desa.....	15
1. Pengertian Dana Desa.....	15
2. Tujuan Dana Desa.....	17

3. Fungsi Pengelolaan Dana Desa	18
4. Sumber Dana Desa	21
5. Arah kebijakan Dana Desa.....	21
6. Penyaluran Dana Desa	22
7. Penggunaan Dana Desa.....	23
8. Indikator Pengelolaan Dana Desa.....	26
9. Pelaksanaan Dana Desa	27
C. Pembangunan.....	28
1. Pengertian Pembangunan.....	28
2. Pembangunan Desa.....	30
3. Bidang-Bidang Pembangunan Desa	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Sifat Penelitian	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi.....	40
2. Dokumentasi.....	41
3. Wawancara	42
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	44
E. Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Sejarah Desa.....	49
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	51
3. Jumlah Penduduk.....	52
4. Profesi Penduduk.....	53
B. Pembahasan	54

BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
RIWAYAT HIDUP.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	8
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi	41
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Dokumentasi	42
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara.....	43
Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Waringin Jaya	49
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	52
Tabel 4.3 Profesi Penduduk.....	53
Tabel 4.4 Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Tahun 2020.....	58
Tabel 4.5 Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Tahun 2021.....	60
Tabel 4.6 Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Tahun 2022.....	61
Tabel 4.7 Pendapatan Desa	65
Tabel 4.8 Bentuk Pembiayaan Desa Tahun 2020.....	66
Tabel 4.9 Bentuk Pembiayaan Desa Tahun 2021	68
Tabel 4.10 Bentuk Pembiayaan Desa Tahun 2022	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Waringin Jaya	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Alat Pengumpul Data	84
Lampiran 2: Bagan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.....	93
Lampiran 3: Bagan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.....	93
Lampiran 4: Bagan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.....	93
Lampiran 5: Pembangunan Desa Tahun 2020	94
Lampiran 6: Pembangunan Desa Tahun 2021	97
Lampiran 7: Pembangunan Desa Tahun 2022	100
Lampiran 8: Prasasti-Prasasti Pembangunan Tahun 2020.....	101
Lampiran 9: Prasasti-Prasasti Pembangunan Tahun 2021	103
Lampiran 10: Prasasti-Prasasti Pembangunan Tahun 2022	106
Lampiran 11: Wawancara Dengan Sekertaris Desa	107
Lampiran 12: Wawancara Dengan Kepala Dusun 1	107
Lampiran 13: Wawancara Dengan Kepala Dusun 3.....	108
Lampiran 14: Wawancara Dengan Anggota LPM	108
Lampiran 15: Wawancara Dengan Masyarakat	109
Lampiran 16: Surat Izin Prasurvey	110
Lampiran 17: Surat Balasan Prasurvey	111
Lampiran 18: Surat Bimbingan Skripsi	112
Lampiran 19: Kartu Bimbingan Skripsi.....	113
Lampiran 20: Surat Izin Research	119
Lampiran 21: Surat Tugas	120
Lampiran 22: Surat Balasan Research	121
Lampiran 23: Surat Keterangan Bebas Pustaka	122
Lampiran 24: Hasil Turnitin.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Waringin Jaya merupakan desa yang berada di Kecamatan Bandar Sribhawono, kabupaten Lampung Timur, provinsi Lampung. Desa tersebut berdiri pada tanggal 09 Februari 1987. Desa ini merupakan pemekaran dari desa Sribhawono dan desa Wana, dengan jumlah penduduk 2.367 jiwa dan profesi mayoritas penduduknya 80% petani karena masih banyak peladangan.² Sebagai sebuah desa, Waringin Jaya juga mengelola dana desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014. Dana desa pertama kali di Indonesia sejak tahun 2015 sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.³ Dana desa turun ke Desa Waringin Jaya pada tahun 2015 pada masa pemerintahan bapak Suprpto (2015-2016) sampai dengan Ibu Sri Wahyuni (2017-sekarang).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan,

² Eko Adi Wibowo (Sekertaris Desa), *Dokumentasi* (Desa Waringin Jaya, 5 Desember 2022).

³ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait* (Visimedia, 2015), hlm. 41.

pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.⁴ Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Permasalahan yang dialami dalam pengelolaan dana desa sangat beragam, karena setiap tahunnya dana desa diperhitungkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknisnya (JUKNIS). Kesulitan yang dialami pemerintah desa dalam mengembangkan dana desa yaitu pagu anggaran yang terkadang turunnya lambat, sehingga pihak desa merasa kesulitan dalam merinci dana yang akan digunakan. Dalam hal ini pemerintah desa beserta pihak aparatur desa yang mengatur dana desa tidak bisa berbuat apapun selain menunggu pagu anggaran turun dari pusat.

Kesulitan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan pendidikan yaitu dana desa yang turun dari pemerintah pusat setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko selaku sekretaris Desa Waringin Jaya bahwa dana desa yang diberikan untuk pembangunan desa pada tahun 2019 berfokus pada bidang pembangunan Pendidikan 25% dan sarana prasarana lingkungan 15%. Sedangkan untuk tahun 2020 hingga 2022 dana desa difokuskan untuk pembangunan di bidang kesehatan sebanyak 20% dan untuk bidang pembangunan ekonomi serta bidang sarana prasarana lingkungan sebanyak

⁴ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

10%.⁵ Sehingga laporan dari pihak desa harus sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Pelaporan aset desa merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban desa kepada pemangku kepentingan termasuk pemerintah desa dan negara bagian (pemerintah pusat).⁶ Oleh karena itu, pelaporan keuangan kas desa bersifat wajib, dan masalah yang mungkin terjadi dapat segera diidentifikasi jika kemauan staf tidak mencukupi/tidak menguntungkan.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 94 menyatakan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.⁷ Dalam hal ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah seharusnya dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dengan cara berkerjasama dengan berbagai pihak guna memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai wewenang dalam pembangunan yang ada di desa melalui sistem pemerintahan desa antara lain yaitu musyawarah untuk merencanakan pembangunan, menggerakkan

⁵ Eko Adi Wibowo (Sekertaris Desa Waringin Jaya), *Wawancara* (Kantor Desa Waringin Jaya, 21 Juni 2022).

⁶ Andika Pramukti, "Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar," *Buletin Udayana Mengabdi* Vol. 18, No. 3 (2019), hlm. 68.

⁷ Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, hlm. 90.

serta meningkatkan intervensi masyarakat melalui gotong royong dalam melaksanakan pembangunan, mengembangkan ketahanan dan kondisi dinamisme masyarakat.⁸

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa merupakan penghimpunan dan pertanggungjawaban yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁹ Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Pada sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran penting dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan yaitu salah satunya pembangunan desa bidang pendidikan.¹⁰ Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mengatur sendiri kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri, karena setiap desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai kondisi sosial budaya yang sudah ada dalam desa tersebut termasuk dalam pengaturan keuangan guna kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan pembangunan fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam mengembangkan serta memajukan desa tersebut.

⁸ Fatimah Aziz and Irmawati Irmawati, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep)," *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)* Vol. 1, No. 2 (2021): hlm. 11.

⁹ Muhibbin Syah, *Undang-Undang (UU) Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 2004, hlm. 1.

¹⁰ Titi Darmi and Iqbal Miftakhul Mujtahid, "Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 3, no. 1 (2020): hlm. 554.

Seperti yang diungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN, 2015-2019) tentang permasalahan yang ada di desa.¹¹ Pembangunan Desa pada intinya diusahakan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terdapat di desa, seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, terbatasnya pilihan pekerjaan yang berkualitas, masih minimnya sarana kesehatan dan pendidikan, tingginya konversi lahan dampak tekanan kebutuhan permukiman dan industri, meningkatnya degradasi lahan akibat pembangunan yang tidak menghiraukan aspek keberlanjutan, kerentanan bencana alam yang tinggi, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut Permendes No. 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, desa dikelompokkan dalam tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangannya dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh desa.¹²

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bermaksud meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.¹³ Dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri setidaknya 2000 desa pada tahun 2019. IDM mempunyai beberapa

¹¹ Andreas Reichenbach et al., *Peraturan Presiden (PERPRES) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, Progress in Retinal and Eye Research*, vol. 561, 2019.

¹² Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun*, Jakarta, 2016, hlm. 20., http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016.

¹³ Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, hlm. 46.

aspek pembentuk seperti aspek ketahanan sosial yaitu bidang pendidikan, ekonomi dan ekologi.¹⁴

Dana Desa yang turun di Desa Waringin Jaya pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 858.055.000 dan total pendapatan Desa keseluruhan secara umum adalah sebesar Rp. 1.500.913.242. Pada tahun 2021 Dana Desa yang turun di Desa Waringin Jaya yaitu sebesar Rp. 883.562.000 dengan total pendapatan keseluruhan yaitu sebesar Rp. 1.647.442.348. Sedangkan pada tahun 2022 Dana Desa yang turun sebesar Rp. 790.650.000 dan dengan pendapatan Desa keseluruhan yaitu sebesar Rp. 1.421.459.239.¹⁵

Dalam anggaran dana yang cukup besar ini, masyarakat mempunyai persepsi negatif mengenai pengelolaan dana desa di Desa Waringin Jaya. Hal ini terlihat dari pembangunan di tahun 2020 pemerintah Desa hanya berfokus pada bidang sarana prasarana lingkungan di dusun 1. Di tahun 2021 pembangunan sarana prasarana sudah terlihat optimal dengan memperlihatkan pemerataan pembangunan di masing-masing dusun. Namun di tahun 2022, pembangunan hanya ada pada dusun 1, 2, dan 4 saja. Dalam hal ini, masyarakat merasa bahwa terdapat kesenjangan pembangunan antar dusun yang mengakibatkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas mengenai pengelolaan dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang sarana prasarana lingkungan di Desa tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai “Analisis

¹⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

¹⁵ Amin Nugroho (Kaur Keuangan), *Dokumentasi* (Desa Waringin Jaya, 15 Mei 2023).

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan sebuah pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan sarana prasarana lingkungan di desa Waringin Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan bukti konkrit terhadap pembangunan bidang sarana prasarana lingkungan di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 bahwa memajukan kesejahteraan umum menjadi tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat dalam penelitian ini yaitu dapat digunakan untuk menambah wawasan baru mengenai pemerintahan desa, serta mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya.

c. Bagi Aparatur Desa

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan desa dalam program pengelolaan dana desa.

E. Penelitian Relevan

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan. Adapun beberapa hasil penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1.	Rafsan Jani mahasiswa IAIN Palopo, dengan judul skripsi "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Bolang". ¹⁶	Membahas manajemen atau pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa	Dalam skripsi Rafsan Jani berfokus pada manajemennya sedangkan penelitian saya pengelolaannya.
2.	Icha Shintia Dewi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam". ¹⁷	Penelitian skripsi ini membahas pengelolaan dana desa.	Dalam penelitian skripsi Icha Shintia Dewi berfokus pada kepuasan masyarakat, sedangkan penelitian saya berfokus pada pembangunan desa.
3.	Khumaira Aprilia mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul skripsi "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar". ¹⁸	Penelitian skripsi ini membahas pengelolaan dana desa dan pembangunan	Dalam skripsi Khumaira menekankan pada pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, sedangkan penelitian saya menekankan pada pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya.
4.	Husnul Khatimah mahasiswa Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat". ¹⁹	Penelitian skripsi ini membahas pengelolaan dana desa	Dalam skripsi Husnul hanya berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian saya fokus pada pembangunan di bidang sarana prasarana lingkungan.
5.	Astiana Selvia mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone dengan judul skripsi	Penelitian skripsi ini membahas tentang dana desa dan pembangunan	Dalam penelitian Astiana membahas tentang pemanfaatan dana desa

¹⁶ Rafsan Jani, *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembagunan Desa Bolang*, 2021.

¹⁷ Icha Shintia Dewi, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁸ Khumaira Aprilia, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar" (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021).

¹⁹ Husnul Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat," *Kaos GL Dergisi* (Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

	<p>“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.²⁰</p>		<p>dan penunjangannya dalam pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian saya membahas pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunannya.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mencoba meneliti tentang peristiwa yang terjadi di desa Waringin Jaya dengan judul analisis pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya, yang berada di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan lokasi penelitian. Kemudian berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan di Desa Waringin Jaya, sebelumnya belum pernah ada yang meneliti tentang pengelolaan dana desa di desa tersebut.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul analisis pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di Desa Waringin Jaya. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

²⁰ Astiani Selvia, “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)” (Sulawesi Selatan: IAIN Bone, 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu: “*management*” yang artinya mengatur dan mengelola. Pengelolaan merupakan suatu proses untuk mengatur dan mewujudkan sesuatu yang diinginkan dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²¹ Pengelolaan juga diartikan sebagai suatu proses membuat sebuah perencanaan melalui organisasi dan kepemimpinan usaha dalam mengelola atau mengatur anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi tertentu.

Adapun beberapa kegiatan dari pengelolaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. Pengordinasian
- e. Pengawasan
- f. Penilaian.²²

Menurut pendapat Arikunto, berdasarkan teori dan konsep pengelolaan diartikan sebagai manajemen, pengaturan, atau pengurusan.

²¹ Dewi Risnawati, “*Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,*” Volume 5 (2017): hlm. 202.

²² Erwin Widiasworo, *Cerdas Pengelolaan Kelas* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hlm. 1.

Sedangkan menurut Stoner manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Oleh karena itu, pengelolaan diartikan sebagai serangkaian proses pekerjaan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai mencapai tujuan tertentu.²³

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk melakukan sebuah perencanaan, organisasi, penggerakan atau pemberi komando, dan pengawasan yang dapat dimanfaatkan sumber daya yang dimilikinya guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan organisasi secara bersama-sama.

2. Elemen Dasar Pengelolaan

Berdasarkan pendapat Husaini, elemen dasar dalam pengelolaan yaitu sebagai berikut:

a. Sifat

- Seni

Seni merupakan suatu kemampuan, keterampilan, kemahiran, dan keahlian dalam menggunakan aplikasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.²⁴

²³ Boedijono Boedijono et al., "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso," *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* Vol. 4, No (2019): hlm. 11.

²⁴ Yunhendri Danhas, *Analisis Pengelolaan Dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 10.

- Ilmu

Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang telah disusun dan diorganisir untuk mencapai kebenaran umum.

b. Fungsi

Secara umum, fungsi pengelolaan yaitu melakukan perancangan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*).

c. Sasaran

Sasaran dari pengelolaan yaitu melalui 6M.

- 1) *Man*
- 2) *Money*
- 3) *Mechine*
- 4) *Material*
- 5) *Method*
- 6) *Market*.²⁵

3. Teori Pengelolaan

Odgers menyatakan pendapat bahwa ada 4 (empat) teori mengenai pengelolaan, yaitu sebagai berikut:

1) Pengelolaan klasik

Pada teori pengelolaan klasik, terdapat dua pandangan yaitu sebagai berikut:

²⁵ Ibid.

- Pengelolaan ilmiah

Menurut bapak manajemen perkantoran yaitu William H. Leffingwell, terdapat lima prinsip untuk bekerja efektif, yaitu:

- Perencanaan kerja
- Penjadwalan kerja
- Pelaksanaan kerja
- Pengukuran kerja
- Memberi gaji pekerja

- Pengelolaan kesatuan yang utuh

Menurut Fayol, untuk mencapai teori pengelolaan kesatuan yang utuh, pengelola dituntut untuk memberikan perhatian pada masalah administrasi yang terjadi dalam suatu organisasi.²⁶

2) Pengelolaan Perilaku

Pendekatan perilaku ilmiah merupakan suatu aliran yang berpusat pada aspek manusia. Dalam teori pengelolaan perilaku terdapat 2 (dua) pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- Pendekatan hubungan manusia

Pendekatan hubungan manusia yaitu aliran yang muncul dikarenakan adanya interaksi sosial dalam sebuah pekerjaan.

- Pendekatan perilaku ilmiah

²⁶ Ibid., hlm. 11.

Pendekatan perilaku ilmiah yaitu aliran perilaku yang muncul dikarenakan pekerjaan yang dilakukan harus mencapai target yang diinginkan.

3) Pengelolaan Ilmiah

Dalam teori ilmiah, pengelolaan dianggap sebagai ilmu murni dan ilmu terapan yang masih membutuhkan pendekatan dan riset secara ilmiah.

4) Pengelolaan Kualitas

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu teori pengelolaan yang menekankan pada kemampuan tim dalam suatu pekerjaan, memberdayakan pekerja, mengakui suatu organisasi, serta siap melayani dan dapat menerima kritikan konsumen dengan baik.²⁷

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²⁸ Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa

²⁷ Ibid., hlm. 12.

²⁸ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 10.

diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²⁹ Dalam kurun waktu 1 tahun dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat untuk Desa cukup besar.

Hal yang dapat dilakukan dalam mengelola dana desa adalah dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa itu sendiri. Seperti contohnya yaitu melakukan gotong royong dalam suatu pembangunan. Sehingga dengan adanya kegiatan gotong royong selain mempererat kebersamaan, uang yang dipergunakan untuk pembangunan tidak akan bertambah atau membengkak lebih banyak lagi pengeluarannya. Sementara itu bahan baku yang digunakan diharapkan ada di daerah sekitar desa, sehingga akan memberikan suatu pendapatan kepada masyarakat yang menjual bahan baku tersebut.³⁰

Untuk menerapkan pelaksanaan peraturan undang-undang desa dengan baik, hal yang perlu dilakukan yaitu sinkronisasi penyusunan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan indikator pengelolaan seperti keterbukaan dalam penggunaan dana desa, bertanggung jawab atas pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, dan tingkat keberhasilan yang efisien dalam mencapai suatu tujuan. Dalam menguatkan fungsi dan kerja sama dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi yang terlibat dalam merancang keputusan bersama yaitu

²⁹ Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, hlm. 56.

³⁰ Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, hlm. 10.

diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Dan Menteri Desa.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat menentukan dana desa sebesar 10% kemudian dana akan ditransfer melalui beberapa tahap. Dana desa dapat dihitung berdasarkan jumlah desa yang ada dan juga jumlah penduduk desa. Selain itu, luas wilayah, tingkat kesulitan, dan kemiskinan di desa juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah dana desa yang akan diturunkan. Agar tidak terjadi penyimpangan maka diperlukan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap dana desa yang dikelola tidak menyimpang dari pelaksanaan peraturan undang-undang. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara bertingkat yaitu dari level pusat hingga daerah.

2. Tujuan Dana Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengangkat kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.³¹

³¹ Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, hlm. 21.

3. Fungsi Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut:

a) Perencanaan (Pasal 20)

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.³²

b) Pelaksanaan (Pasal 24)

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.³³

³² Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan.Bpk.Go.Id*, vol. 51, 2014, hlm. 9-10., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.

³³ *Ibid.*, hlm. 11.

c) Penatausahaan (Pasal 35)

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.³⁴

d) Pelaporan (Pasal 37)

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.³⁵

³⁴ Ibid., hlm. 13.

e) Pertanggungjawaban (Pasal 38)

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.³⁶

4. Sumber Dana Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat (2), pemerintah memberikan mandat untuk mengalokasikan dana desa yang

³⁵ Ibid., hlm. 14.

³⁶ Ibid.

dianggarkan APBN sebagai suatu hasil pendapatan desa. Adapun awal mula hasil pendapatan dana desa yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana yang bersumber dari APBN
- c. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa dari kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga
- g. Maupun pendapatan desa yang sah.³⁷

5. Arah kebijakan Dana Desa

Arah kebijakan dana desa bertujuan untuk membantu pengalokasian dana desa, maka dalam hal ini arah kebijakan tersebut difokuskan pada:

- a) Pengangkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial
- b) Meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa
- c) Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas dana desa yang dikelola maka pemerintah melakukan kebijakan sesuai dengan jumlah penduduk miskin

³⁷ Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, hlm. 78.

serta luas wilayah desa. Oleh karena itu kebijakan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan *performance* atau kinerja pelaksanaan.

Arah kebijakan dana desa juga harus mempertajam prioritas pembangunan di bidang sarana prasarana lingkungan karena sarana prasarana lingkungan sangat penting bagi masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui dana desa mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan yang memadai, memberikan peluang tenaga kerja, serta meningkatkan pembangunan masyarakat sehingga juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

6. Penyaluran Dana Desa

Aspek penting dalam melaksanakan dana desa yang akan disalurkan yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah desa. Meskipun dalam hal tersebut pemerintah desa mempunyai wewenang sebagai penyalur dana desa, tetapi dalam kewenangannya pelaksanaan tersebut harus tetap menyertakan fungsi dan peran pemerintah kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) serta memastikan jangkauan penggunaan dana desa, dalam beberapa ketentuan ini proses penyaluran dana desa harus terpenuhi terlebih dulu, baik dari pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten. Dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan dari Rekening Kas

³⁸ Djorghie J Waworuntu, Daisy S M Engka, and Een N Walewangko, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Mokobang Kecamatan Modinding," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 22, No. 6 (2022): hlm. 26.

Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).³⁹

7. Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu:

a. Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda bedakan.

³⁹ Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, hlm. 20.

b. Kebutuhan Prioritas

Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa

c. Kewenangan Desa

Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

d. Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat

e. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa

Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal

f. Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Sesuai dengan permandes Nomor 19 Tahun 2017, prioritasnya untuk⁴⁰

1) Pembangunan desa

Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:

⁴⁰Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017.

- a) Desa
 - b) Sosial pelayanan dasar
 - c) Usaha ekonomi desa
 - d) Lingkungan hidup dan lainnya.
- 2) Pemberdayaan masyarakat desa
- Diarahkan untuk :
- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa
 - b) Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa
 - c) Pengembangan sistem informasi desa
 - d) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial desa
 - e) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
 - f) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi
 - g) Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup
 - h) Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam dan KLB lainnya
 - i) Bidang kegiatan lainnya.

Penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan di desa Waringin Jaya yaitu berfokus pada pembangunan sarana prasarana dan juga infrastruktur. Seperti yang dikatakan Ibu Sri Wahyuni selaku kepala desa Waringin Jaya, dana desa tersebut diperuntukkan pada bidang pembangunan fisik seperti pembangunan underlath, gorong-gorong, *drainase* atau saluran air, Gedung PAUD, dan jambansasi. Hal ini

dilakukan berdasarkan sistem pengelolaan yang ditetapkan langsung oleh kepala desa sejak tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2023 ini, dana desa nantinya akan difokuskan dalam pembangunan badan jalan di Dusun V Waringin Jaya.⁴¹

8. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Adapun Indikator pengelolaan dana desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 2 adalah:

- a. Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- b. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat
- c. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.⁴²

⁴¹ Sri Wahyuni (Kepala Desa), *Wawancara* (Desa Waringin Jaya, 2022).

⁴² Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 51: hlm. 3.

9. Pelaksanaan Dana Desa

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, peran kepala desa dalam menjalankan penatausahaan keuangan desa harus terdapat bendahara desa untuk mengatur dana tersebut. Bendahara desa harus ditetapkan sebelum tahun anggaran bersangkutan dimulai dan berdasarkan keputusan dari kepala desa. Bendahara merupakan seseorang yang dipilih kepala desa untuk mengatur masalah keuangan, baik itu menerima, menyimpan, membayar, dan mempertanggungjawabkan uang tersebut dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).⁴³

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 wajib mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tertib. Bendahara harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulan atau paling lambat 10 bulan berikutnya. Pengeluaran dan pendapatan dicatat melalui Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pajak Pembantu, dan Buku Bank Desa. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 hanya buku-buku itulah yang dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi, jika tidak ada buku tersebut maka bendahara wajib melaporkan keuangan dengan menggunakan neraca untuk mengetahui aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu

⁴³ Ibid., hlm. 13.

periode. Setiap belanja desa dan mengeluarkan pembiayaan dari desa maka wajib mendapatkan persetujuan yang sah terlebih dahulu dari kepala desa dan pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.⁴⁴

C. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti bangkit. Pembangunan merupakan upaya untuk mempengaruhi masa depan. Kata pembangunan mempunyai implikasi sebagai berikut: a) berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. b) Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Siagian berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan perubahan dan pertumbuhan secara terencana atau tersusun dan secara sadar ditempuh oleh suatu bangsa negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik.

⁴⁴ Ibid., hlm. 14-15.

Berdasarkan pendapat Tjokroamidjojo, pembangunan secara umum adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan *paradigm* atau *mindset* masyarakat dari tradisional menuju modern. Oleh karena itu, inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan. Dari definisi tersebut pembangunan dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencapai suatu pertumbuhan dan perubahan pemikiran seseorang guna mencapai tujuan negara yang diinginkan.

Sedangkan menurut Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho secara sederhana pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan kesejahteraan berdasarkan dimensi definisi sosial, politik, ekonomi, atau hukum. Perubahan ini merupakan suatu perubahan yang melembaga dalam membangun kehidupan sosial sekelompok manusia.⁴⁵

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya secara terencana untuk membawa masyarakat dalam keadaan yang lebih layak dan maju lagi. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan perubahan pembangunan yang ada dengan baik. Hal ini dikarenakan tujuan awal dari pembangunan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah

⁴⁵ Iskandar Kato et al., *Manajemen Pembangunan Daerah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 3.

harus lebih memperhatikan masyarakat yang ada di desa dan tidak hanya berfokus pada daerah perkotaan saja.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah bentuk aktivitas secara sadar dan terencana dari pemerintah untuk desa guna membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan desa dalam berbagai bidang kehidupan meliputi: penghidupan dengan menggunakan sumberdaya desa, bantuan pemerintah, organisasi-organisasi atau lembaga domestik maupun internasional secara terencana, terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.⁴⁶

Berdasarkan pendapat Daeng Sudirwo, pembangunan desa adalah suatu perubahan yang terus menerus dilakukan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa beserta pemerintah dan lembaga-lembaga desa guna meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan peraturan yang ada di desa.⁴⁷

Diperkuat dalam Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya pada masyarakat desa.⁴⁸ Dalam hal ini, pembangunan desa merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan pemerintah dengan

⁴⁶ Umar Nain, *Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik* (Yogyakarta: INSISTPress & Amongkarta, 2018), hlm. 18-19.

⁴⁷ Amtai Alaslan, "Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa" Vol. 1 No. (2021): hlm. 102.

⁴⁸ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa* (Jakarta: LAKSANA, 2019), hlm. 10.

memberikan kebutuhan serta sarana dan prasarana dalam menjalankan suatu proses pembangunan desa.

Oleh karena itu, pembangunan pada masyarakat desa memiliki arti penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan, populasi pengangguran, kesenjangan masyarakat desa dan perkotaan, serta kesenjangan rakyat miskin dan kaya. Perekonomian daerah yang terbuka dan demokratis menjadi tantangan bagi masyarakat desa untuk mengurangi hal tersebut, sesuai dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia bahwa pembangunan di desa akan lebih diprioritaskan.⁴⁹

Menurut Sayogyo agar pembangunan desa dapat mencapai sasaran maka harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan terkordinasi melalui:

1) Prinsip Pembangunan Desa

- a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.
- b. Dinamis dan berkelanjutan.
- c. Menyeluruh, terpadu dan terkordinasi.

2) Pokok Kebijaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
- b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat.
- c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif.

⁴⁹ Arna Suryani, "Manajemen Pengelolaan Dana Desa," *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* (2019): hlm. 349.

3) Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran dalam pembangunan desa yaitu mengembangkan taraf hidup masyarakat dan menjadikan semua desa-desa di seluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat klasifikasi desa swasembada.

4) Obyek dan Subyek Pembangunan

- Adapun yang menjadi obyek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala potensi manusia, alam dan teknologinya serta mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan di desa.
- Usaha pembangunan desa diarahkan kepada menjadikan desa itu bukan saja menjadi objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mantap.⁵⁰

3. Bidang-Bidang Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemerintahan desa Waringin Jaya. Pelaksanaan pembangunan tersebut melalui program-program yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga Lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan harus diawali dengan sebuah perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga-lembaga masyarakat. Perancangan tersebut tentunya harus berdasarkan penyesuaian dari aspirasi masyarakat, peraturan yang berlaku, dan juga kebutuhan pada desa tersebut.

⁵⁰ Umar Nain, *Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik, loc.cit.*

Berikut merupakan bidang-bidang pembangunan desa dalam pelaksanaan program pembangunan:

1) Pembangunan Di Bidang Sarana Prasarana Lingkungan

Bidang ini merupakan program pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyangkut lingkungan sekitar desa seperti jalan desa, saluran irigasi, drainase dan sarana prasarana lingkungan lainnya. Adapun prioritas pembangunan ini biasanya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti informasi yang didapat berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa bahwa penggunaan dana desa ini salah satunya untuk pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih, sebagai berikut:

- a) Drainase sebagai program pembangunan desa berupa pembangunan kanal atau saluran air.
- b) Jalan desa sebagai program pembangunan desa seperti perbaikan jalan desa yang menghubungkan satu desa dengan desa lain atau jalan akses ke wilayah lain.⁵¹

Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang selalu mengikuti perkembangan teknologi dan pemikiran masyarakat yang menggunakannya, karena jalan merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mencapai daerah yang ingin dijangkau. Sebagai suatu sistem transportasi nasional, jalan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup

⁵¹ Desa), *Wawancara*.

yang dikembangkan melalui pembangunan wilayah untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkeadilan antar wilayah.⁵²

2) Pembangunan Di Bidang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 merupakan hak asasi manusia yang termasuk salah satu komponen kesejahteraan dan harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa segala pekerjaan pembangunan harus berwawasan kesehatan dalam arti bahwa pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.⁵³

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, negara harus dapat menjamin hak masyarakat untuk hidup sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang adil, memadai, terjangkau, dan bermutu. Pembangunan bidang kesehatan melibatkan peran aktif masyarakat dan pranata sosial yang ada. Masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan yang sama dan mereka memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Oleh karena itu, harus diupayakan pemenuhan kebutuhan

⁵² Gendut Sukarno, dkk., *Data Dan Informasi Manfaat Dana Desa Di Provinsi Jawa Timur* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, 2018), hlm. 277.

⁵³ Mussie Ghebrebrhan Zerizghy et al., "Undang-Undang (UU) Tentang Kesehatan," *American Journal of Research Communication* 5, no. August (2009): hlm. 1., [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003><http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf><http://www.>

dasar rakyat Indonesia yang terutama dipenuhi melalui sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.⁵⁴

Dengan adanya pembangunan di bidang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membantu mewujudkan perilaku atau pola hidup sehat, serta mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

3) Pembangunan Di Bidang Pendidikan

Berdasarkan pendapat Djafri, peranan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia sangat menentukan keberlangsungan hidup pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintahan, dan jika sumber daya manusia yang terlibat berkualitas baik dalam hal kejujuran dan kemampuan pengambilan keputusan, maka proses pemerintahan itu baik dan tegas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan tepat.⁵⁵

Berdasarkan pendapat Zamroni, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan meningkatkan kualitas layanan pelatihan termasuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi Program latihan. Keterlibatan masyarakat ini dapat berupa komite sekolah atau otoritas pendidikan.

Jika otonomi pendidikan dipahami sebagai proses kemandirian sekolah

⁵⁴ Nopiani Nopiani, "Implementasi Program Pembangunan Dibidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8, no. 3 (2019): hlm. 131.

⁵⁵ Ade Lia Putri et al., "Implementasi Pancasila Dalam Pembangunan Dibidang Pendidikan," *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 7, no. 1 (2020): hlm. 14.

(lembaga) dalam pengelolaan segala sumber daya yang ada, dunia Pendidikan itu harus beroperasi sesuai dengan enam kriteria untuk keberhasilan desentralisasi pendidikan: kepentingan nasional, kualitas pendidikan, efisiensi administrasi, kesetaraan, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat.⁵⁶

Dalam hal ini, pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk membangun pengetahuan masyarakat melalui Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta mencerdaskan kehidupan dan juga pola pikir masyarakat. Tidak hanya dengan Pendidikan sekolah saja, tetapi program pembangunan di bidang Pendidikan ini juga terdiri dari program pembinaan luar sekolah yang bertujuan untuk memfasilitasi warga masyarakat untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

4) Pembangunan Di Bidang Ekonomi

Penggerak ekonomi saat ini adalah paradigma pembangunan ekonomi yang berorientasi pada ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu. budaya pengetahuan dan inovasi. ekonomi informasi menekankan bahwa ekonomi memiliki nilai tambah yang tinggi melalui penggunaan informasi dan inovasi. Ada dua tujuan dalam pelaksanaan mandat ekonomi tersebut, yaitu: (1) peningkatan produk unggulan daerah dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Berdasarkan pendapat Blakely dan

⁵⁶ Hobarth Williams Soselisa, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Bidang Pendidikan Dasar Di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku," *Pekerjaan Sosial* 18, no. 2 (2019): hlm. 404.

Bradshaw, mengidentifikasi produk unggulan merupakan langkah awal dalam merencanakan pengembangan ekonomi lokal. Identifikasi potensi ekonomi lokal adalah penentuan sektor riil yang perlu dikembangkan agar ekonomi lokal tumbuh pesat.⁵⁷

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan dilaksanakan seluas-luasnya dan meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan perekonomian. Pembangunan ekonomi yang disyaratkan oleh konstitusi Indonesia harus dilakukan atas dasar kemandirian dengan segala peluang yang ada dalam masyarakat, termasuk kemandirian dalam sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Karena Pasal 33 (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, keterpaduan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.⁵⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga untuk desa. Pada bidang pembangunan ini ditentukan berdasarkan prioritas dan kebutuhan desa terlebih dahulu.

⁵⁷ Prihadi Nugroho, Samsul Ma’rif, and Novita Rohmana Putri, “Kelitbangan Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Semarang,” *Jurnal Riptek* 15, no. 2 (2021): hlm. 60.

⁵⁸ Laurensius Arliman, “Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): hlm. 274.

5) Pembangunan Di Bidang Seni dan Budaya

Harry Sulastianto mendefinisikan pembangunan di bidang seni budaya sebagai kemampuan menghadirkan ide dan pemikiran yang indah untuk menciptakan peradaban yang lebih maju. Kebudayaan suatu bangsa selalu identik dengan keragaman seni yang terlibat, kebudayaan nasional dapat menjadi sesuatu yang unik dan mencerminkan jati diri bangsa.⁵⁹

Perkembangan seni budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang harus dipastikan keberadaannya oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Jumlah pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota/Kabupaten pada tahun 2015-2019 sebanyak 28 kali. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan seni budaya di daerah/kota tahun 2015-2019.⁶⁰

Dalam bidang seni dan budaya bertujuan untuk membangun, meningkatkan, serta memelihara seni dan kebudayaan yang dimiliki oleh desa. Kegiatan dilakukan dalam pembangunan ini yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat desa guna mengembangkan kreativitas dan juga melestarikan seni dan budaya yang ada di desa.

⁵⁹ Dadang Suwanda, Dailibas, Raden Nasution, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2010), hlm. 68.

⁶⁰ Ibid.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah sosial secara mendalam. Penelitian tersebut menggunakan sumber data dan lingkungan alamiah sebagai pusat informasi. Dalam penelitian ini peneliti dapat mengamati, mencatat, dan bertanya mengenai fenomena yang terjadi dalam lingkungan tersebut.⁶¹

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan di masa sekarang atau masa lalu tanpa memanipulasi keadaan.⁶² Penelitian deskriptif yang dimaksud peneliti adalah penelitian yang menggambarkan situasi dan kondisi desa dan bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *field research*. Penelitian *field research* adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk memahami fenomena apa

⁶¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 85.

⁶² Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), hlm. 36.

yang dialami oleh mereka yang diteliti dalam konteks alam tertentu.⁶³ Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penulis yaitu sumber data primer dan juga skunder.⁶⁴ Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber asli yaitu pemerintah desa, aparatur pemerintahan desa atau kasi-kasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan. Data primer merupakan sumber data yang secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penulis. Data primer dilakukan berdasarkan observasi, dokumentasi, dan juga wawancara. Sedangkan data skunder diperoleh dari data-data yang berupa catatan, jurnal atau artikel-artikel, dokumentasi, laporan kegiatan, dan internet, serta referensi lain sebagai sumber pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data berdasarkan media pengamatan dengan cara yang lebih spesifik, karena memiliki responden yang tidak terbatas dan juga objek-objek alam yang lain.⁶⁵ Observasi juga

⁶³ Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: SIC, 2004), Hlm. 24.

⁶⁴ Mahfud Solihin dan Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software Stata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hlm. 26.

⁶⁵ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, hlm. 141.

diidentifikasi sebagai pengamatan secara langsung mengenai ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Penulis melakukan observasi di desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Tujuan observasi ini dilakukan untuk mengamati keadaan di lapangan serta mencatat berbagai hal penting dalam mengimplementasikan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di desa Waringin Jaya. Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu melalui pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waringin Jaya. Peralatan yang digunakan dalam observasi ini yaitu alat perekam gambar (*handphone*) dan alat tulis.

Tahap awal dalam melakukan kegiatan dalam penelitian yaitu observasi awal yang mana peneliti telah melakukan pra survey sebelum melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran masalah terkait pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di desa Waringin Jaya.⁶⁶

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Observasi

No.	Indikator	Hasil Observasi		Bentuk Aktivitas
		Tampak	Belum Tampak	
1.	Transparansi			
2.	Partisipasi			
3.	Akuntabilitas			

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian yang mengumpulkan informasi dari sumber, dimana sumber dokumentasi adalah foto, dokumen, dan rekaman video dan audio yang dapat digunakan sebagai

⁶⁶ Ibid.

bukti dalam penelitian. Kajian metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dimana dokumen yang diberikan oleh subjek sendiri ditelaah dan dianalisis.⁶⁷

Dokumentasi digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya.⁶⁸ Secara singkat, dokumentasi merupakan proses pengumpulan data berupa dokumen dan foto terkait dengan pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Dokumentasi

No.	Dokumentasi Dicari	Hasil Dokumentasi	
		Ada	Tidak Ada
1.	Sejarah Singkat Desa		
2.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Waringin Jaya		
3.	Jumlah Penduduk Desa Waringin Jaya		
4.	Profesi Penduduk Desa Waringin Jaya		
5.	Data Pembangunan Desa Waringin Jaya		
6.	Kegiatan Pembangunan Desa Waringin Jaya		

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu peristiwa percakapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi yang diperlukan melalui informan.⁶⁹

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terbuka atau transparan, agar penulis dapat memahami tentang pengelolaan dana desa terhadap

⁶⁷ Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 65-66.

⁶⁸ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, hlm. 141.

⁶⁹ Ibid.

pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Tujuan wawancara tersebut adalah untuk memahami tentang dana desa serta pengelolaannya dan juga pelaksanaan pembangunan di desa tersebut.

Adapun beberapa informan dari pihak Desa yang membantu memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya, yaitu:

1. Pemerintah desa seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kasi
2. Tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun, RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
3. Masyarakat desa Waringin Jaya

Tabel 3.3
Kisi-Kisi Wawancara

No.	Subjek	Indikator	Sub indicator
1.	Pemerintah Desa	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Waringin Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Desa Waringin Jaya 2. Kebijakan kepala desa Waringin Jaya 3. Realisasi bentuk pembangunan desa Waringin Jaya 4. Kepuasan kepala desa dalam pembangunan setelah adanya dana desa di desa Waringin Jaya 5. Perencanaan pembangunan desa Waringin Jaya
2.	Tokoh Masyarakat	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Waringin Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dana desa 2. Keterlibatan pengelolaan dana desa 3. Penggunaan dana desa 4. Program pembangunan desa
3.	Masyarakat	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Waringin Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dana desa 2. Keterlibatan pengelolaan dana desa 3. Penggunaan dana desa 4. Program pembangunan desa

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga dapat diambil kesimpulan dengan data yang berbeda-beda serta dapat memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁷⁰

Teknik yang digunakan sebagai penjamin keabsahan data yaitu melalui pemeriksaan teknik yang telah dikumpulkan untuk kepentingan penelitian guna membandingkan valid tidaknya data yang diperoleh.⁷¹ Oleh karena itu, dalam mendukung teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara, metode yang digunakan yaitu triangulasi. Teknik yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari hasil wawancara beberapa sumber data. Data yang didapatkan akan terbukti valid atau absah apabila informasi yang didapatkan dari partisipan dan responden atau sumber data sudah mencapai pada titik jenuh dan mendapat kesimpulan

2. Teknik Triangulasi Metode

Teknik triangulasi metode merupakan teknik yang digunakan dalam menguji metode yang digunakan oleh peneliti. Berdasarkan teknik

⁷⁰ Muhammad Alif K, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah* (Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2019), hlm. 10.

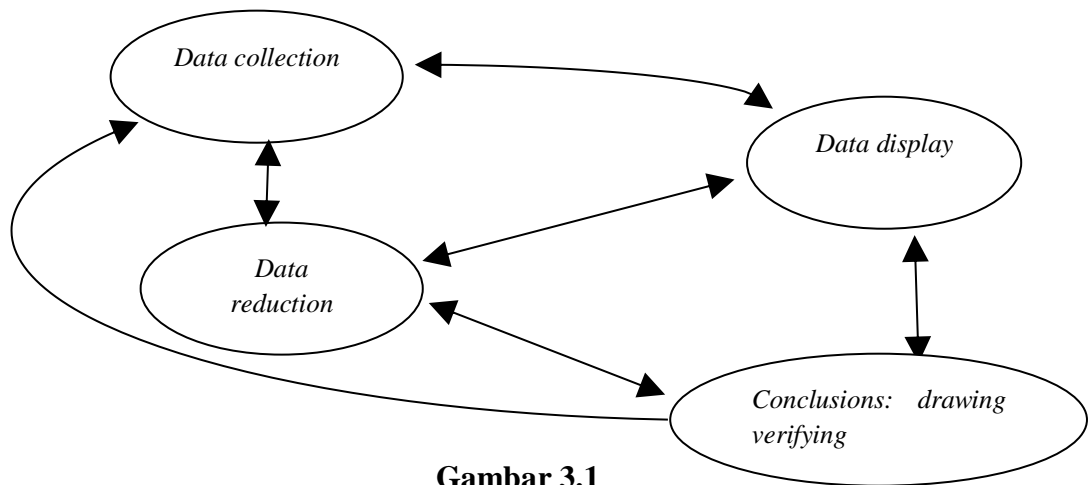
⁷¹ Ibid.

pengumpulan data yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi, dari ketiga metode tersebut diuji keabsahan datanya dengan cara membandingkan data dan memastikan bahwa data tersebut berkaitan dan tidak bertolak belakang dengan hasil yang telah diteliti.⁷²

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses dalam menemukan dan merangkai data yang dilakukan secara sistematis dan beturutannya terhadap sebuah data yang sudah dihasilkan dari adanya kegiatan wawancara, dokumentasi maupun observasi. Data yang telah diperoleh dari hasil tersebut akan dianalisis melalui teknis analisis data yang tersusun secara sistematis. Dalam menganalisa data kualitatif, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kegiatan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif harus dilakukan secara terus-menerus sehingga data yang diperoleh bersifat jenuh. Miles dan Huberman juga berpendapat bahwa teknik analisis data meliputi tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah diperoleh akan dikumpulkan ke dalam beberapa alur atau tahap yang telah disebutkan oleh Miles dan Huberman Miles yaitu seperti gambar berikut:

⁷² H Radian, Y., & Suparmin, *Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Smk Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun 2016* (IAIN Surakarta, 2017), hlm. 57-58.



Gambar 3.1
Analisis Data Kualitatif

Adapun penjelasan dari gambar tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahapan pengumpulan data merupakan tahap memasuki lingkungan masyarakat (Desa Waringin Jaya) dan melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan berdasarkan data yang diambil dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dan pokok dari data-data yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian. Pada tahap ini nantinya data yang diperoleh akan dikelompokkan dan kemudian ditransformasikan melalui catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Tahap ini akan berlangsung selama penelitian dilakukan. Pada tahapan ini peneliti akan menyederhanakan data atau hasil penelitian dari lapangan agar dapat menjadi bahan acuan dan juga mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi apabila suatu saat dibutuhkan oleh peneliti selanjutnya. Data yang

direduksi dalam penelitian ini yaitu berupa data mentah berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dibuat rangkuman atau catatan-catatan penting di lapangan.⁷³

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data merupakan tahapan yang dibuat untuk memberikan informasi guna memberikan dugaan adanya penarikan sebuah kesimpulan supaya data-data tersebut dapat terorganisir dengan baik dan tersusun secara rapi. Pada tahapan ini penyajian data bisa dibuat dalam sebuah bentuk tabel dan deskripsi atau narasi singkat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti agar mudah dipahami dan dianalisis. Data yang disajikan merupakan data yang didapat dari lapangan yaitu mengenai pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap terakhir yaitu tahapan penarikan kesimpulan atau *verification*, yaitu suatu tahapan penarikan sebuah kesimpulan dari data-data yang sudah dianalisis.⁷⁴ Jadi, dalam penarikan kesimpulan data yang sudah dianalisis akan diverifikasi menjadi kesimpulan yang valid.

⁷³ Helaluddin & Hengki WJaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 123.

⁷⁴ Ibid., hlm. 124.

Berdasarkan uraian di tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap teknik analisis ini, data yang dikumpulkan dari Desa Waringin Jaya akan melalui tahap pemilihan data, kemudian data tersebut akan disajikan untuk memberi dugaan, dan tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Desa Waringin Jaya

Desa Waringin Jaya diresmikan pada tanggal 09 Februari 1987. Desa tersebut merupakan pemekaran Desa Sribhawono dan Desa Wana. Desa ini berdiri dibawah naungan Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.⁷⁵

Desa ini berbatasan dengan desa-desa lainnya. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sribhawono, sebelah timur berbatasan dengan Desa Wana dan Desa Sribhawono, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wana Kecamatan Melinting, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sripindowo.⁷⁶

Desa Waringin Jaya berkembang karena dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Nama-nama Kepala Desa yang dipercaya untuk memimpin Desa Waringin Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Waringin Jaya

No.	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1.	M. Hadi Nuri	1987-1992
2.	Sardi	1993-1994
3.	AM Daman	1994-2002 2002-2008 2008-2011
4.	Suprpto	2012-2017
5.	Sri Wahyuni	2018-2023

⁷⁵ Eko Adi Wibowo (Sekertaris Desa), *Dokumentasi*. (Desa Waringin Jaya, 5 Desember 2022).

⁷⁶ Ibid.

Pada awalnya Desa Waringin Jaya dipimpin oleh bapak M. Hadi Nuri dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992. Beliau membawahi 5 Kepala Dusun dengan 20 RT dan 10 RW. Beliau dibantu oleh Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang diketuai oleh Bapak Somo Pawiro dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang diketuai oleh Bapak Sadino.⁷⁷

Pada tahun 1993 kepemimpinan Desa Waringin Jaya dipegang oleh Bapak Sardi. Kemudian pada tahun 1994 Desa Waringin Jaya melaksanakan pemilihan Kepala Desa langsung oleh masyarakat. Pada tahun tersebut yang terpilih menjadi Kepala Desa yaitu Bapak AM. Daman. Beliau menjabat selama 8 tahun dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2002.⁷⁸

Pada masa berakhirnya jabatan bapak AM. Daman sebagai Kepala Desa, di tahun 2002 Penanggung Jawab Sementara (PJS) yaitu Ibu Sri Wahyuni. Kemudian pada saat itu, dilakukan pemilihan Kepala Desa kembali secara langsung oleh masyarakat dan untuk yang terpilih yaitu Bapak AM. Daman. Beliau menjabat sebagai kepala Desa dari tahun 2002 sampai dengan 2008. Setelah berakhirnya masa jabatan itu berakhir, maka di tahun 2008 Bapak AM. Daman diangkat sebagai pejabat Kepala Desa sampai dengan tahun 2011.⁷⁹

Pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 21 Desember, Desa Waringin Jaya kembali melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, langsung, bebas, dan rahasia. Untuk kepala Desa yang terpilih dan

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

dipercaya yaitu Bapak Suprpto yang menjabat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.⁸⁰

Kemudian pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 04 Desember kembali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa. Untuk Kepala Desa yang terpilih dan dipercaya untuk memimpin desa Waringin Jaya yaitu Ibu Sri Wahyuni. Beliau menjabat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.⁸¹

Desa Waringin Jaya mempunyai visi dan misi yaitu: perintis Desa Waringin Jaya sehingga tercipta rukun, aman, tentram, dan makmur bagi masyarakat Desa Waringin Jaya.⁸²

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Waringin Jaya

Adapun struktur Organisasi Pemerintahan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,⁸³ yaitu sebagai berikut:

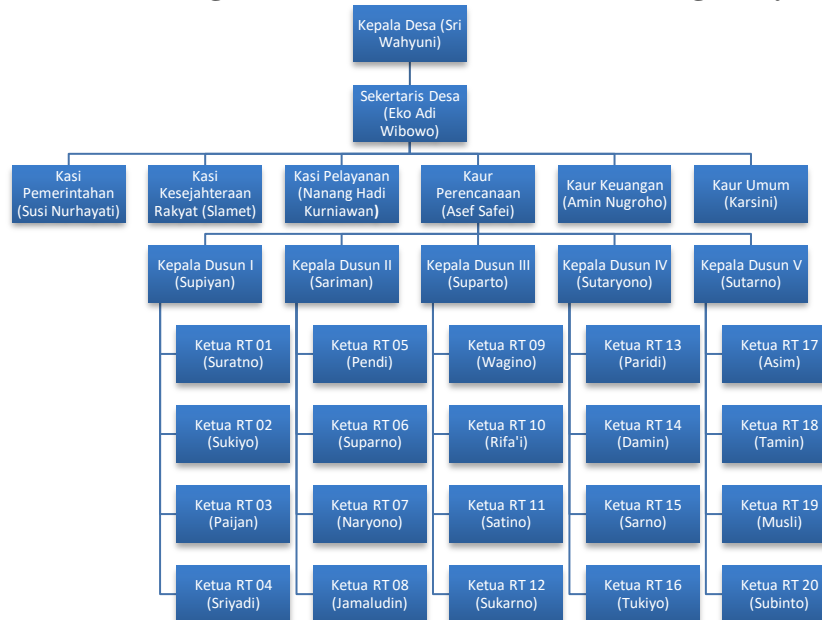
⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

⁸³ Eko Adi Wibowo (Sekertaris Desa), *Dokumentasi* (Desa Waringin Jaya, 2023).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Waringin Jaya



3. Jumlah Penduduk Desa Waringin Jaya

Berdasarkan hasil laporan kependudukan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhwno, Kabupaten Lampung Timur, Pada bulan Maret 2023, terdapat jumlah penduduk di akhir bulan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No.	Nama Dusun	Jumlah Akhir Bulan			
		KK	Jumlah Jiwa		
			L	P	L+P
1.	I	183	311	294	598
2.	II	166	273	237	510
3.	III	154	238	253	491
4.	IV	113	169	174	343
5.	V	117	186	189	373
Total		733	1177	1147	2315

Sumber: Dokumen Jumlah Penduduk Bulan Maret 2023

Berdasarkan tabel 4.2 yaitu jumlah penduduk Desa Waringin Jaya yang diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi yaitu sebagai berikut:

pada dusun 1 terdapat 183 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki sebanyak 311 jiwa dan perempuan 294 jiwa, jadi total laki-laki dan perempuan dusun 1 yaitu sebanyak 598 jiwa. Kemudian pada dusun 2 terdapat 166 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki sebanyak 273 jiwa dan perempuan 237 jiwa, jadi total laki-laki dan perempuan dusun 2 yaitu sebanyak 510 jiwa. Selanjutnya, pada dusun 3 terdapat 154 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki sebanyak 238 jiwa dan perempuan 253 jiwa, jadi total laki-laki dan perempuan dusun 3 yaitu sebanyak 491 jiwa. Pada dusun 4 terdapat 113 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki sebanyak 169 jiwa dan perempuan 174 jiwa, jadi total laki-laki dan perempuan dusun 4 yaitu sebanyak 343 jiwa. Terakhir, pada dusun 5 terdapat 117 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki sebanyak 186 jiwa dan perempuan 189 jiwa, jadi total laki-laki dan perempuan dusun 5 yaitu sebanyak 373 jiwa. Jadi total jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 1.177 jiwa dan perempuan sebanyak 1.147 jiwa. Sehingga total keseluruhan jumlah penduduk di akhir bulan Maret tahun 2023 yaitu sebanyak 2.315 jiwa.⁸⁴

4. Profesi Penduduk Desa Waringin Jaya

Profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada latihan keterampilan yang menjadikan suatu keterampilan yang professional. Di Kabupaten Lampung Timur, khususnya di Desa Waringin Jaya, sebagian besar penduduknya mempunyai profesi atau

⁸⁴ Ibid.

mata pencaharian di bidang pertanian. Berikut merupakan jumlah profesi yang ada di Desa Waringin Jaya:⁸⁵

Tabel 4.3
Jumlah Profesi Penduduk

No.	Profesi	Jumlah
1.	Petani	1.396
2.	Guru	17
3.	Dokter	4
4.	Wiraswasta	575
5.	TNI/Polri	1
6.	Buruh Serabutan	322
Total		2.315

Berdasarkan tabel 4.3 yaitu jumlah profesi penduduk, dapat diketahui bahwa profesi yang ada di Desa Waringin Jaya yaitu: petani sebanyak 1.369 jiwa karena di Desa ini terdapat lahan pertanian terluas dibandingkan desa lainnya, kemudian guru sebanyak 17 jiwa, dokter sebanyak 4 jiwa, wiraswasta sebagai pedagang sebanyak 575 jiwa, TNI/Polri sebanyak 1 jiwa, dan buruh serabutan sebanyak 322 jiwa.

B. Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu realitas sosial dimana dalam penyelenggaraannya terjadi interaksi sosial antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan Kabupaten, perangkat desa dan juga masyarakat. Dana Desa yang dikelola merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan tersebut diawali dengan perencanaan yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusRenBang).

⁸⁵ Ibid.

Tujuan dari adanya Dana Desa salah satunya adalah mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sejak adanya dana desa, pembangunan Desa di Waringin Jaya lumayan berkembang, karena dengan adanya pembangunan-pembangunan dari dana desa tersebut dapat membantu dalam memenuhi harapan masyarakat terutama dalam hal pembangunan Desa. Pembangunan Desa tentunya memudahkan akses masyarakat, hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Ahmad Rakino sebagai warga desa Waringin Jaya yang mengungkapkan bahwa, “dengan adanya pembanguan ini tentunya dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar, kami tidak kekurangan air lagi, dan gorong-gorong memperlancar kita dalam menuju akses ke pemakaman”.⁸⁶

Salah satu arah kebijakan Dana Desa yaitu mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya arah kebijakan tersebut, tentunya pembangunan saat ini seharusnya diperhatikan dan diprioritaskan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Adi Wibowo selaku sekretaris Desa Waringin Jaya yang mengatakan bahwa “kebijakan kepala desa dan pemerintah desa yaitu yang pertama pada pembangunan fisik yaitu meliputi yang bekerja itu orang-orang yang ada di Desa Waringin Jaya. Jadi Dana Desa itu dianjurkan tidak keluar dari Desa Waringin Jaya, untuk pembelian material, untuk pekerja agar semua pihak Desa Waringin Jaya itu ikut merasakan Dana Desa walaupun dengan

⁸⁶ Ahmad Rakino, *Wawancara* (Desa Waringin Jaya, 2023).

bekerja”.⁸⁷ Jadi dalam pernyataan ini dana desa dapat disalurkan kepada masyarakat dalam pembangunan fisik yaitu untuk membeli dan bekerja. Membeli yang dimaksud adalah membeli barang dari masyarakat yang menjual material atau bahan bangunan desa, dan bekerja yang dimaksud adalah dengan memberikan tenaga sepenuhnya terhadap pembangunan untuk mendapatkan gaji. Selain itu biasanya masyarakat yang bergotong royong juga diberikan upah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai pengelolaan dana desa bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dan dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan yang didanai dengan dana desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat.⁸⁸

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 dilaksanakan secara bertahap.⁸⁹ Begitu juga dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Waringin Jaya. Tahapan dalam pengelolaan tersebut terdiri 5 tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu penyusunan konsep dari kegiatan yang akan dilaksanakan yang disusun secara teliti, terstruktur, dan benar-

⁸⁷ Eko Adi Wibowo, *Wawancara* (Desa Waringin Jaya, 2023).

⁸⁸ Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, hlm. 56.

⁸⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 51:hlm. 9-14.

benar dipikirkan tujuan apa yang ingin dicapai. Dalam pengelolaan Dana Desa perencanaan disusun secara berjangka dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa (PerDes). Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya hal yang pertama dibentuk adalah tim pelaksana yang diadakan dalam Musyawarah Rencana Bangunan (MusRenBang). Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Eko Adi Wibowo selaku sekretaris Desa yang mengatakan bahwa “Dalam pengelolaan Dana Desa, hal pertama yang kami lakukan yaitu musyawarah mengenai Dana Desa yang akan diperuntukkan untuk pembangunan sehingga kita membentuk sebuah tim. Tim pelaksananya yaitu ada Kepala Desa, sekretaris Desa, bendahara Desa untuk mengurus keuangan, dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa”.⁹⁰ Adapun pendapat dari penelitian Khumaira Aprilia yang menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan yang pertama harus dilakukan yaitu membuat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBangDes). Dalam forum tersebut Pemerintah Desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.⁹¹

Dalam tahap ini, penelitian dari Rafsan mengenai manajemen dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Bolang juga diawali dengan pembentukan tim pelaksana karena dalam pandangan Islam perencanaan adalah suatu konsep yang dibuat matang-matang dan jelas. Dimana

⁹⁰ Wibowo, *Wawancara*.

⁹¹ Aprilia, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar,” hlm. 50.

didalamnya terdapat sebuah tujuan dan juga pertimbangan sebelum melakukan sebuah pekerjaan.⁹² di Begitu juga dengan Desa Waringin Jaya, pada tahapan ini Pemerintah Desa Waringin Jaya mengawali tahap perencanaan dengan membentuk tim pelaksana berdasarkan musyawarah karena harus menetapkan tahapan serta tujuan yang akan dicapai.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan bentuk realisasi dari sebuah perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan semua pendapatan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Berdasarkan hasil observasi peneliti melalui prasasti-prasasti yang ada di Desa Waringin Jaya, terdapat pelaksanaan pembangunan yang sudah terealisasikan di Desa Waringin Jaya pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2020

Tahun	Pembangunan	Anggaran Dana	Lokasi
2020	Rehab Balai Desa	Rp. 273.039. 700	Dusun 1
	Pembangunan <i>paving block</i> dan <i>jogging track</i>	Rp. 45.822.400	Dusun 1
	Pembangunan podium	Rp. 159.819.000	Dusun 1
	Pembangunan sumur bor	Rp. 56.568.500	Dusun 3
	Pembangunan lapangan volley	Rp. 71.591.400	Dusun 1
	Total	Rp. 606.841.000	

Sumber: Prasasti Pembangunan Desa Waringin Jaya

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa pembangunan yang digunakan untuk sarana prasarana lingkungan di Desa Waringin Jaya yaitu: rehab balai Desa dengan anggaran dana Rp. 273.039.700 yang berlokasi di Dusun 1 Waringin Jaya, pembangunan *paving block* dan

⁹² Rafsan Jani, *ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBAGUNAN DESA BOLANG*, hlm. 46.

jogging track dengan anggaran dana Rp. 45.822.400 yang berlokasi di Dusun 1, pembangunan podium atau ruang ganti dengan anggaran dana Rp. 159.819.000 yang berlokasi di Dusun 1, pembangunan sumur bor dengan anggaran dana Rp. 56.568.500 yang berlokasi di dusun 3, dan pembangunan lapangan volly dengan anggaran dana Rp. 71.591.400 berlokasi di dusun 1 Waringin Jaya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran dana yang digunakan yaitu dengan nilai total Rp. 606.841.000.

Dari pembangunan sarana prasarana lingkungan pada tahun 2020, dapat dilihat juga bahwa pembangunan di Desa Waringin Jaya dilakukan kurang merata dan hanya berfokus pada dusun 1 dan salah satu pembangunan di dusun 3. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Waringin Jaya sangat memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa setiap tahun. Dalam penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Waringin Jaya membangun sarana prasarana lingkungan berdasarkan kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Suparto selaku Kepala Dusun 3 yang menyatakan bahwa “Adapun usulan atau aspirasi dari masyarakat itu kita tidak realisasikan bukan berarti tidak baik. Jadi itu sebenarnya baik, tapi itu kit acari yang lebih penting, yang lebih bermanfaat untuk masyarakat”.⁹³

⁹³ Suparto (Kepala Dusun 3), *Wawancara* (Desa Waringin Jaya, 2023).

Seperti yang dapat dilihat, dusun 1 merupakan akses paling ramai di Desa Waringin Jaya. Kantor desa serta lapangan Desa terletak pada dusun 1. Sehingga ini dapat menjadi muka pemerintahan atau tampilan luar untuk orang lain menilai Desa tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Desa memutuskan bahwa dusun 1 dijadikan prioritas pembangunan sarana prasarana lingkungan pada tahun 2020. Adapun pembangunan sumur bor di tahun 2020 yang ada di dusun 3 dikarenakan berdekatan dengan Mushola. Sumur bor tersebut dibangun karena masyarakat yang ada di Dusun 3 kesulitan air jika hanya mengandalkan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sehari hidup sehari mati. Sehingga Pemerintah Desa memutuskan untuk membangun sumur Bor di Dusun tersebut.

Selanjutnya bentuk nyata dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2021

Tahun	Pembangunan	Anggaran Dana	Lokasi
2021	Pembukaan badan jalan	Rp. 218.742.000	Dusun 4 dan 5
	Sumur Bor	Rp. 56.880.000	Dusun 1
	Rehab balai desa lanjutan	Rp. 90.270.000	Dusun 1
	Pembangunan gorong-gorong	Rp. 53.802.400	Dusun 1, 2, 3 dan 4.
	Pembangunan sarana sorga dan lampu	Rp. 108.239.200	Dusun 1
	Total	Rp. 527.933.600	

Sumber: Prasasti Pembangunan Desa Waringin Jaya

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dana digunakan untuk pembukaan badan jalan yang berada di dusun 4 dan dusun 5 dengan anggaran dana Rp. 218.742.000, sumur bor di dusun 1 tepatnya di depan kantor Desa dengan anggaran Rp. 56.880.000, rehab balai desa lanjutan

yang ada di dusun 1 dengan anggaran dana Rp. 90.270.000, pembangunan gorong-gorong atau jembatan desa di dusun 1 hingga dusun 4 dengan anggaran Rp. 53.802.400, dan pembangunan sarana sorga dan lampu desa dengan anggaran Rp. 108.239.200. Jadi total jumlah keseluruhan pembangunan fisik di desa Waringin Jaya yang menggunakan Dana Desa yaitu Rp. 527.933.600.

Adapun bentuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2022

Tahun	Pembangunan	Anggaran Dana	Lokasi
2022	Pembukaan badan jalan	Rp. 143.960.300	Dusun 1 dan 2
	Pembangunan jembatan Desa	Rp. 44.032.200	Dusun 4
	Total	Rp. 187.992.500	

Sumber: Prasasti Di Desa Waringin Jaya.

Keterangan pada tabel tersebut di atas merupakan bentuk pembangunan yang dilakukan di Desa Waringin Jaya. Dimana pembangunan tersebut menggunakan anggaran Desa, antara lain untuk pembukaan badan jalan Desa dan pembangunan jembatan Desa. Anggaran desa tersebut berjumlah sebesar Rp. 187.992.500 yang berlokasi di dusun 1, dusun 2, dan dusun 4. Pada tahun ini, pembangunan sarana prasarana lingkungan hanya memprioritaskan pembangunan badan jalan dan jembatan Desa. Hal ini dikarenakan jalan dusun 1 dan dusun 2 sangatlah memprihatinkan sebelumnya. Begitupun dengan jembatan Desa di dusun 4, jembatan ini terletak di tengah-tengah perkebunan. Jembatan tersebut sangatlah memprihatinkan sebelumnya karena hanya menggunakan kayu. Jembatan tersebut merupakan akses para petani menuju perkebunan. Oleh

karena itu, Pemerintah Desa mengutamakan pembangunan sarana prasarana lingkungan yang sangat dibutuhkan bagi para petani di Desa Waringin Jaya.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan tugas dari seorang bendahara Desa. Pada tahap ini Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan terstruktur.⁹⁴ Untuk melalui tahap ini bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban.

Adapun wawancara peneliti dengan Bapak Amin Nugroho selaku kaur keungan Desa yang menyampaikan bahwa “tahap penatausahaan yang dilakukan yaitu saya bertanggungjawab dalam pencatatan pendapatan dan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan. jadi saya membuat laporan itu setiap bulan yang nantinya akan disampaikan dalam forum penyampaian LPJ atau laporan dan pertanggungjawaban”.⁹⁵ Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 pasal 35 bahwa dalam pengelolaan Dana Desa tahap penatausahaan melakukan pencatatan dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.⁹⁶

Adapun bentuk dokumentasi yang disampaikan kepada peneliti tentang sumber pendapatan Dana Desa di Desa Waringin Jaya selama 3

⁹⁴ Khatimah, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat,” hlm. 81.

⁹⁵ Amin Nugroho, *Wawancara* (Desa Waringin Jaya, 15 Mei 2023).

⁹⁶ Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 51:hlm. 13.

tahun terakhir tepatnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pendapatan Desa 2020-2022

No.	Tahun	Pendapatan	Anggaran
1.	2020	Dana Desa	Rp. 858.055.000
		Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Rp. 25.884.000
		Alokasi Dana Desa	Rp. 616.738.000
		Bunga bank	Rp. 236.242
		TOTAL	Rp. 1.500.913.242
2.	2021	Dana Desa	Rp. 883.562.000
		Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 19.732.942
		Alokasi Dana Desa	Rp. 741.830.530
		Bunga bank	Rp. 316.876
		Bagi hasil BUMDES	Rp. 2.000.000
		TOTAL	Rp. 1.647.442.348
3.	2022	Dana Desa	Rp. 790.650.000
		Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Rp. 45.138.989
		Alokasi Dana Desa	Rp. 555.624.776
		Bunga bank	Rp. 45.474
		Swadaya HUT Desa	Rp. 30.000.000
		TOTAL	Rp. 1.421.459.239

Sumber: Data dari Kaur Keuangan Desa Waringin Jaya, Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel pendapatan Desa di Desa Waringin Jaya pada tahun 2020, tercatat bahwa pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebanyak Rp. 858.055.000. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak Rp. 25.884.000. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 616.738.000 dan bunga bank sebanyak Rp. 236.242. Jadi total pendapatan keseluruhan di tahun 2020 sebanyak Rp. 1.500.913.242. Sedangkan untuk tahun 2021 pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebanyak Rp. 883.562.000. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak Rp. 19.732.942. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 741.830.530. bunga bank sebanyak Rp. 316.876 dan bagi hasil BUMDES sebanyak Rp. 2.000.000. Jadi total pendapatan keseluruhan di

tahun 2021 sebanyak Rp. 1.647.442.348. Dan untuk tahun 2022 pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebanyak Rp. 790.650.000. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak Rp. 45.138.989. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 555.624.776. bunga bank sebanyak Rp. 45.474 dan Swadaya HUT Desa sebanyak Rp. 30.000.000. Jadi total pendapatan keseluruhan di tahun 2021 sebanyak Rp. 1.421.459.239.

Adapun bentuk-bentuk pembiayaan Desa di Desa Waringin Jaya selama tiga tahun terakhir yang diberikan oleh kaur keuangan. Dalam hasil laporan belanja desa tahunan yang peneliti dapatkan, tentunya berbeda-beda. Berikut merupakan hasil laporan belanja desa di Desa Waringin Jaya pada tahun 2020.

Tabel 4.8
Bentuk Pembiayaan Desa Waringin Jaya Tahun 2020

No.	Belanja Desa	Jumlah Dana
1.	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 601.029.242
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 397.408.200
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp. 384.416.800
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Rp. 48.926.000
5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	Rp. 99.512.000
Total		Rp. 1.531.292.242

Sumber: Pemerintahan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas tercatat bahwa dana yang dianggarkan dalam bentuk pembiayaan pembangunan Desa yaitu sebanyak Rp. 397.408.200. Adapun bentuk nyata yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu pada tabel 4.4 yaitu tabel pelaksanaan pembangunan tahun 2020 sebesar sejumlah Rp. 606.841.000 sedangkan bentuk pembiayaan untuk

pembangunan Desa hanya sejumlah Rp. 397.408.200. Hal ini dikarenakan pembangunan sarana prasarana lingkungan yang ada di Desa Waringin Jaya tidak hanya program dari bidang pelaksanaan pembangunan, melainkan juga melibatkan dari bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang pembinaan masyarakat dengan sub bidang kepemudaan dan olahraga. Seperti pendapat Bapak Amin Nugroho selaku kaur keuangan yang menyatakan bahwa “pembangunan tidak hanya berasal dari bidang 2 atau bidang pelaksanaan pembangunan Desa, tetapi ada juga yang berasal dari bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dengan sub bidang kepemudaan dan olahraga”.⁹⁷ Pak Amin juga menyatakan bahwa “yang termasuk sub bidang kepemudaan dan olahraga itu lapangan volly, podium, *jogging track*, dan wahana olahraga yang ada disamping podium itu”.⁹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa jika hanya pelaksanaan pembangunan saja tidak akan mencukupi untuk belanja desa, belum lagi untuk pembangunan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang-bidang yang lain apabila hanya memfokuskan pada bidang sarana prasarana lingkungan. Oleh karena itu pemerintah Desa memutuskan bahwa anggaran dana di tahun 2020 tidak hanya menggunakan anggaran pelaksanaan pembangunan, melainkan juga menggunakan pemberdayaan masyarakat, dana silpa tahun sebelumnya, dan juga sisanya diambil dari dana pembinaan masyarakat sub bidang kepemudaan dan olahraga.

⁹⁷ Nugroho, *Wawancara*.

⁹⁸ Ibid.

Selain itu di tahun 2021 terdapat bentuk pembiayaan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9
Bentuk Pembiayaan Desa Waringin Jaya Tahun 2021

No.	Belanja Desa	Jumlah Dana
1.	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 700.545.818
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 560.594.800
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp. 233.257.730
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Rp. 57.244.000
5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	Rp. 117.850.000
Total		Rp. 1.669.492.348

Sumber: Pemerintahan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2021.

Berdasarkan pembiayaan Desa Waringin Jaya di atas, dapat diketahui, dana yang dianggarkan dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa adalah sebesar Rp. 560.594.800.00. Adapun bentuk nyata yang dilakukan di tahun 2021 yaitu pada tabel 4.9 yaitu pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan dengan jumlah total Rp. 527.933.600 dari pendanaan sebesar Rp. 560.594.800.

Selanjutnya di tahun 2022, terdapat bentuk pembiayaan Desa sebagai berikut:

Tabel 4.10
Bentuk Pembiayaan Desa Waringin Jaya Tahun 2022

No.	Belanja Desa	Jumlah Dana
1.	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 598.296.425
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 349.797.000
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp. 145.750.000
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Rp. 39.982.000
5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	Rp. 316.800.000
Total		Rp. 1.450.625.425

Sumber: Pemerintahan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2022.

Berdasarkan pembiayaan Desa Waringin Jaya di atas, dapat diketahui, dana yang dianggarkan dalam bidang pelaksanaan pembangunan adalah sebesar Rp. 349.797.000. Adapun bentuk nyata yang dilakukan yaitu pada tabel 4.10 yaitu pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan dengan jumlah total Rp. 187.992.500 dari pendanaan bidang pembangunan sebesar Rp. 349.797.000. Sisa dari Dana tersebut difokuskan pada bidang pembangunan Kesehatan dan juga beberapa pembangunan di bidang Pendidikan di Desa Waringin Jaya.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan, bendahara masih sangat berperan penting dikarenakan masih terkait dengan tugas bendahara sebagai pencatat keluar masuknya dana. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban Kepala Desa yang berperan penting dalam menyampaikan laporannya. Pada tahap ini Kepala Desa nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Dalam laporan tersebut Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama dan juga laporan semester akhir tahun. Sedangkan untuk masyarakat Desa Waringin Jaya, laporan tersebut akan disampaikan melalui prasasti-prasasti yang ada di setiap pembangunan sarana prasarana lingkungan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa yang diwakilkan kepada Bapak Eko Adi Wibowo selaku sekretaris Desa Waringin Jaya yang menyampaikan bahwa “biasanya untuk pelaporan pertanggung jawaban bendahara selalu membuat laporan seperti mencatat

pendapatan dan pengeluaran dan juga melakukan tutup buku setiap akhir bulan yang nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban”.⁹⁹ Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa yaitu pada tahap keempat pasal 37 yaitu tahap pelaporan dan tahap kelima pada pasal 38 yaitu tahap pertanggungjawaban.¹⁰⁰ Pada tahap ini Icha Shintia Dewi dalam penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa dalam laporan paling lambat diajukan 10 bulan berikutnya dan dalam tahap pelaporan itu yang digunakan adalah dokumen penatausahaan mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dalam penyampaiannya juga disampaikan Kepala Desa melalui APBDesa, yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat secara menggunakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat.¹⁰¹

Adapun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Waringin Jaya kepada masyarakat, berikut pernyataan dari bapak Eko Adi Wibowo selaku sekretaris Desa Waringin Jaya “disetiap pembangunan itu ada prasastinya, jadi didalam prasasti itu ada jenis bangunan, dari bidang apa, dan ada juga jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membangun itu berapa”.¹⁰² Pernyataan tersebut sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap dana yang berasal dari

⁹⁹ Wibowo, *Wawancara*.

¹⁰⁰ Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 51: hlm. 14.

¹⁰¹ Dewi, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” hlm. 82.

¹⁰² Wibowo, *Wawancara*.

Pemerintah Pusat harus ada buktinya. Hal ini merupakan bahwa Desa Waringin Jaya memberikan transparansi kepada masyarakat Desa tersebut terkait Dana Desa yang digunakan.

Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi pengelolaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pengelolaan Dana Desa di Waringin Jaya sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu menggunakan asas transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. Bentuk transparansi dari pengelolaan dana desa yaitu keterbukaan serta keterlibatan terhadap tokoh masyarakat serta masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara dengan Bapak Supiyan selaku Kepala Dusun 1 yang mengatakan bahwa “selama ini tokoh masyarakat selalu dilibatkan dalam penggunaan Dana Desa untuk mengetahui jumlah serta penggunaannya”.¹⁰³ Adapun pendapat dari Bapak Rubiyanto selaku Anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Waringin Jaya yang menyatakan bahwa “masyarakat terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, jadi masyarakat itu tau keluar masuknya dana”.¹⁰⁴ Selain itu ada pula pendapat dari Bapak Ahmad Rakino selaku masyarakat Desa Waringin Jaya yang berpendapat bahwa “bentuk transparansi dari Pemerintah Desa mengenai pengelolaan Dana Desa itu dana yang didapatkan dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada pak Kepala Dusun yang kemudian disampaikan kepada masyarakat”.¹⁰⁵ Tidak hanya berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan, namun bentuk transparansi lainnya juga terdapat sebuah prasasti-prasasti

¹⁰³ Supiyan (Kepala Dusun 1), *Wawancara* (Desa Waringin Jaya, 2023).

¹⁰⁴ Rubiyanto (Anggota LPM), *Wawancara* (Desa Waringin Jaya, 2023).

¹⁰⁵ Rakino, *Wawancara*.

pembangunan sarana prasarana lingkungan di Desa. Dalam prasasti tersebut, terdapat jenis bangunan serta jumlah Dana Desa yang digunakan. Jadi, dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Waringin Jaya sudah transparan.

Adapun bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat yaitu berdasarkan pendapat Bapak Ahmad Rakino selaku Masyarakat Desa Waringin Jaya yang menyatakan bahwa “kalau program pembangunan ini biasanya dilakukan melalui musyawarah mengenai aspirasi masyarakat karena sebelumnya pihak dusun sudah mengusulkan ke pihak Desa jenis bangunan yang diinginkan di dusun kami”.¹⁰⁶ Bentuk partisipatif masyarakat ini didukung oleh Bapak Rubiyanto selaku Anggota LPM Desa Waringin Jaya yang berpendapat bahwa “bentuk partisipasi dari pengelolaan Dana Desa yaitu dalam pembangunan itu berdasarkan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat, tidak langsung dari Kepala Desa. Kalau dalam pembangunan masyarakat berpartisipasi melalui gotong royong dengan membantu pembersihan terasiring, pembangunan badan jalan, dan lain sebagainya”.¹⁰⁷ Dipertegas kembali oleh Kepala Dusun 1 yaitu Bapak Supiyan yang mengatakan “kalau musyawarah diawali pada tingkat dusun dengan masyarakat, terus setelah itu kita lakukan MusRen di tingkat Desa, kemudian kita ajukan ke Kecamatan”.¹⁰⁸ Adapun penegasan dari Kepala dusun 3 yaitu Bapak Suparto yang mengatakan bahwa “bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa itu saat kita melakukan MusDus (Musyawarah Dusun), kita

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Rubiyanto, *Wawancara*.

¹⁰⁸ Supiyan, *Wawancara*.

bawa aspirasi masyarakat ke Musyawarah Dusun dan disitu kita tentukan salah satu ataupun dua yang bisa terdani dengan Dana Desa”.¹⁰⁹ Berdasarkan wawancara oleh beberapa pihak yang didapatkan peneliti, dapat dilihat bahwa masyarakat serta tokoh masyarakat sangat berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya.

Selain itu terdapat bentuk akuntabilitas yang diberikan oleh Pemerintah Desa Waringin Jaya yaitu berupa dokumentasi pendapatan Desa, pembiayaan belanja Desa, serta hasil observasi penggunaan Dana Desa. Dari hasil dokumentasi dan observasi tersebut peneliti mengetahui bagaimana laporan pertanggungjawaban yang Desa Waringin Jaya berikan.

Adapun kesulitan yang dialami pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa yang diwakilkan kepada bapak Eko Adi Wibowo selaku sekertaris Desa Waringin Jaya, kesulitan yang dialami kepala Desa dalam mengelola dana desa yaitu sebagai berikut: “kesulitan yang dialami yaitu pencairannya yang selalu telat, dan untuk yang pertama itu pengajuannya terlalu sulit dan pagu anggaran yang turun dari pusat itu turunnya telat serta kita menunggu perbub. Jadi kita tidak bisa langsung mengajukan dana desa itu dan harus menunggu aturan itu turun”.¹¹⁰ Namun berdasarkan kesulitan yang dialami Kepala Dusun yang ada di Desa Waringin Jaya yaitu berdasarkan pendapat bapak Supiyan selaku Kepala Dusun 1 yang menyatakan bahwa “kalau tingkat kesulitan yang jelas yaitu menyesuaikan dengan RAB-RABnya untuk pembangunan-pembangunan

¹⁰⁹ Suparto (Kepala Dusun 3), *Wawancara*.

¹¹⁰ Wibowo, *Wawancara*.

itu”.¹¹¹ Selanjutnya kesulitan yang dialami bapak Suparto selaku kepala Dusun 3 yaitu “kesulitan yang dialami yaitu banyaknya aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan yang ingin di danai dengan dana desa”.¹¹²

Dari kesulitan yang dialami kepala desa, strategi yang dilakukan kepala desa menurut bapak Eko yaitu “strategi yang kita lakukan yaitu kita hanya bisa menunggu, setelah peraturan itu turun kita lembur siang malam agar cepat selesai dan dana desa itu terlaksana”.¹¹³ Sedangkan berdasarkan kesulitan yang dialami kepala dusun 3 yaitu Bapak Suparto, strategi yang baik dilakukan dalam mengelola dana desa yaitu: “kita sudah fokuskan Namanya musyawarah jadi semua usulan itu kita tampung namun adapun usulan itu tidak kita realisasikan bukan berarti itu tidak baik tapi kita mencari yang lebih penting, yang lebih baik, agar lebih bermanfaat”.¹¹⁴ Strategi yang harus dilakukan menurut kepala dusun 1 yaitu bapak Supiyan berpendapat bahwa “Kita harus bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemerintah desa untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan tersebut”.¹¹⁵

Penelitian ini tentunya layak dilakukan karena agar masyarakat mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Waringin jaya meliputi pendapatan dan berapa jumlah dana yang digunakan dalam pembangunan tanpa harus mencari satu persatu di Desa. Sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya. Penelitian ini berkaitan dengan

¹¹¹ Supiyan, *Wawancara*.

¹¹² Suparto (Kepala Dusun 3), *Wawancara*.

¹¹³ Wibowo, *Wawancara*.

¹¹⁴ Suparto (Kepala Dusun 3), *Wawancara*.

¹¹⁵ Supiyan, *Wawancara*.

penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa dan juga pembangunan namun dalam luas cakupannya berbeda. Seperti pada penelitian Rafsan Jani dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan dana desa sudah baik, dalam laporan pertanggung jawaban juga sudah cukup baik dan pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Desa.¹¹⁶ Dalam hasil penelitian Khumaira pengelolaan dana desa mengikuti prosedur pada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun pada tahapan pelaksanaan pembangunan mengalami keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan yang disebabkan oleh sumber daya manusia.¹¹⁷ Dalam hasil penelitian dari skripsi Icha Shintia menyatakan bahwa pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan sesuai dengan sauri tauladan nabi Muhammad.¹¹⁸ Sedangkan dalam penelitian Husnul Khatimah menyatakan bahwa pengelolaan dana desa sudah cukup baik namun dalam bidang infrastruktur masih kurang memadai dan pada saat musrenbang hanya masyarakat dari kalangan laki-laki tidak ada satupun perempuan yang ikut dalam musyawarah tersebut.¹¹⁹

¹¹⁶ Rafsan Jani, *ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBAGUNAN DESA BOLANG*.

¹¹⁷ Khumaira Aprilia, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar."

¹¹⁸ Icha Shintia Dewi, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

¹¹⁹ Husnul Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat."

Dari hasil penelitian pada penelitian sebelumnya terdapat keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama tentang pengelolaan dana desa. Di Desa Waringin Jaya pengelolaan dana desa sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya pembangunan dibidang sarana prasarana lingkungan masih kurang merata di masing-masing dusun. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa dalam melakukan kegiatan selalu mempertimbangkan bagian wilayah atau daerah yang akan dilaksanakan pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa di Desa Waringin Jaya sudah sesuai dengan amanat Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa bahwa dalam pengelolaan dana harus transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam memberikan laporan setiap tahunnya.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya sudah baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hanya saja pembangunan sarana prasarana lingkungannya masih kurang merata. Ini terlihat pada data pembangunan di tahun 2020, pemerintah Desa hanya memfokuskan dusun 1 dan satu bangunan sumur bor di Dusun 3, di tahun 2021 pembangunan tampak merata, dan di tahun terakhir yaitu tahun 2022 pembangunan hanya ada di dusun 1, dusun 2, dan dusun 4 saja. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Waringin Jaya menyesuaikan kebutuhan prioritas dalam pengelolaannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijadikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Serta Aparatur Desa

Bagi Pemerintah serta Aparatur Desa disarankan sebaiknya adanya Dana Desa diadakan sosialisasi dengan masyarakat lebih luas lagi dan pembangunan bisa dirasakan merata oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham penggunaan Dana Desa selain digunakan untuk pembangunan sarana prasarana lingkungan serta nantinya masyarakat bisa

mengungkapkan aspirasinya secara langsung kebutuhan di dusun mereka. Sehingga, tidak timbul kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa Waringin Jaya.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan mau berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah Desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai penggunaan dana desa serta tidak adanya ketimpangan dalam pembangunan khususnya di bidang sarana prasarana Desa di masing-masing Dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- 1), Supiyon (Kepala Dusun. *Wawancara*. Desa Waringin Jaya, 2023.
- Alaslan, Amtai. “Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa” Vol. 1 No. (2021).
- Anggraini, Mahfud Solihin dan Puspita Ghaniy. *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software Stata*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Aprilia, Khumaira. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.” Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.
- Arliman, Laurensius. “Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 273–294.
- Aziz, Fatimah, and Irmawati Irmawati. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep).” *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)* 1, no. 2 (2021).
- Boedijono, Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, and Venantya Asmandani. “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso.” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* Vol. 4, No (2019).
- Dailibas, Raden Nasution, Dadang Suwanda. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2010.
- Danhas, Yunhendri. *Analisis Pengelolaan Dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Darmi, Titi, and Iqbal Miftakhul Mujtahid. “Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan.” *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 3, no. 1 (2020).
- Desa), Eko Adi Wibowo (Sekertaris. *Dokumentasi*. Desa Waringin Jaya, 2022.
- . *Dokumentasi*. Desa Waringin Jaya, 2023.
- Desa), Sri Wahyuni (Kepala. *Wawancara*. Desa Waringin Jaya, 2022.
- Dewi, Icha Shintia. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas &*

- Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Gendut Sukarno, Dkk. *Data Dan Informasi Manfaat Dana Desa Di Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Hengki WIjaya &, Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Jaya), Eko Adi Wibowo (Sekertaris Desa Waringin. *Wawancara*. Kantor Desa Waringin Jaya, 2022.
- K, Muhammad Alif. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah*. Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2019.
- Kato, Iskandar, Ahmad Faridi, Erika Revida, Darwin Damanik, Robert Tua Siregar, Sukarman Purba, Unang Toto Handiman, Bonaraja Purba, Firdaus Firdaus, and Marto Silalahi. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta, 2016. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. *Peraturan.Bpk.Go.Id*. Vol. 51, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.
- Khatimah, Husnul. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat." *Kaos GL Dergisi*. Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Laksana, Tim Redaksi. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa*. Jakarta: LAKSANA, 2019.
- Nain, Umar. *Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik*. Yogyakarta: INSISTPress & Amongkarta, 2018.
- Nopiani, Nopiani. "Implementasi Program Pembangunan Dibidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8, no. 3 (2019): 130–134.
- Nugroho, Prihadi, Samsul Ma'rif, and Novita Rohmana Putri. "Kelitbangan Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Semarang." *Jurnal Riptek* 15,

no. 2 (2021): 60–68.

- Pramukti, Andika. “Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar.” *Buletin Udayana Mengabdikan* 18, no. 3 (2019): 68–71.
- Putri, Ade Lia, Fhara Dwika Feby Charista, Sri Lestari, and Anita Trisiana. “Implementasi Pancasila Dalam Pembangunan Dibidang Pendidikan.” *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 7, no. 1 (2020): 13–22.
- Radiyan, Y., & Suparmin, H. *Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Smk Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun 2016*. IAIN Surakarta, 2017.
- Rafsan Jani. *ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBAGUNAN DESA BOLANG*, 2018.
- Raharjo, Muhamad Mu’iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Reichenbach, Andreas, Andreas Bringmann, Elsevier Enhanced Reader, Constantin J. Pournaras, Elisabeth Rungger-Brändle, Charles E. Riva, Sveinn H. Hardarson, et al. *Peraturan Presiden (PERPRES) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019. Progress in Retinal and Eye Research*. Vol. 561, 2019.
- Rianto, Yatim. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: SIC, 2004.
- Risnawati, Dewi. “Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.” *Volume 5* (2017): 199–212.
- SELVIA, ASTIANI. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone).” Sulawesi Selatan: IAIN Bone, 2022.
- Soselisa, Hobarth Williams. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN PULAU-PULAU TERSELATAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA (MBD) PROVINSI MALUKU.” *Pekerjaan Sosial* 18, no. 2 (2019).
- Suryani, Arna. “Manajemen Pengelolaan Dana Desa.” *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* (2019).
- Suwendra, Wayan. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Syah, Muhibbin. *Undang-Undang (UU) Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 2004.

- Waworuntu, Djorghie J, Daisy S M Engka, and Een N Walewangko. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Mokobang Kecamatan Modinding." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, no. 6 (2022): 25–36.
- Widiasworo, Erwin. *Cerdas Pengelolaan Kelas*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.
- Zerizghy, Mussie Ghebrebrhan, By Baxter E Vieux, Abineh Tilahun, Mulugojjam Taye, Ferede Zewdu, Dereje Ayalew, Gregory P. Stanton, et al. "Undang-Undang (UU) Tentang Kesehatan." *American Journal of Research Communication* 5, no. August (2009): 12–42. [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003><http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>www.
- QS. Anfal Ayat 8:46*, n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Alat Pengumpul Data

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA**

Disusun Oleh:

**AYU ANITA SARI
NPM 1901071010**



**JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

1443 H / 2023 M

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

A. KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMERINTAH DESA

No.	Indikator	Sub indikator	Nomor Pertanyaan
1.	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Waringin Jaya	1. Profil Desa Waringin Jaya	1, 2, 3
		2. Kebijakan kepala desa Waringin Jaya	4, 5, 6
		3. Realisasi bentuk pembangunan desa Waringin Jaya	7
		4. Kepuasan kepala desa dalam pembangunan setelah adanya dana desa di desa Waringin Jaya	8
		5. Perencanaan pembangunan desa Waringin Jaya	9, 10

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengantar

- a. Wawancara ini ditujukan kepada Pemerintah Desa Waringin Jaya atau yang membantu Kepala Desa dalam mengelola dana desa guna melaksanakan pembangunan. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya. Informasi yang diberikan oleh narasumber sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar S1.
- b. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari kegiatan wawancara semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian.
- c. Informasi yang diberikan oleh narasumber tidak akan mempengaruhi nama baik narasumber itu sendiri.

2. Petunjuk Wawancara

- a. Wawancara semi terstruktur.
- b. Selama kegiatan wawancara berlangsung peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

- c. Waktu pelaksanaan kegiatan wawancara kondisional, dimana dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilapangan hingga diperoleh data yang valid.

3. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Waktu wawancara :
- d. Lokasi wawancara :

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana sejarah singkat berdirinya desa Waringin Jaya ?
2.	Berapa jumlah penduduk Desa Waringin Jaya ?
3.	Apa saja profesi penduduk Desa Waringin Jaya ?
4.	Bagaimana kebijakan kepala desa dalam pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya ?
5.	Apa kesulitan yang dialami Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa ?
6.	Bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut?
7.	Apa saja bentuk nyata pembangunan pada pengelolaan dana desa?
8.	Bagaimana pembangunan desa setelah adanya dana desa?
9.	Apa saja pembangunan yang belum terlaksana?
10.	Apakah rencana pembangunan selanjutnya?

A. KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

No.	Indikator	Sub indikator	Nomor Pertanyaan
3.	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Waringin Jaya	1. Keberadaan dana desa	1, 2
		2. Keterlibatan pengelolaan dana desa	3
		3. Penggunaan dana desa	4
		4. Kesulitan pengelolaan dana desa	5, 6
		5. Program pembangunan desa	7, 8, 9

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengantar

- a. Wawancara ini ditujukan kepada tokoh masyarakat Desa Waringin Jaya yang membantu Kepala Desa dalam mengelola dana desa guna melaksanakan pembangunan. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya. Informasi yang diberikan oleh narasumber sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar S1.
- b. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari kegiatan wawancara semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian.
- c. Informasi yang diberikan oleh narasumber tidak akan mempengaruhi nama baik narasumber itu sendiri.

2. Petunjuk Wawancara

- a. Wawancara semi terstruktur.
- b. Selama kegiatan wawancara berlangsung peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan wawancara kondisional, dimana dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilapangan hingga diperoleh data yang valid.

3. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Waktu wawancara :
- d. Lokasi wawancara :

No	Pertanyaan
1.	Apakah di desa Waringin Jaya sudah ada dana desa ?
2.	Dana desa ini ada sejak tahun berapa ?
3.	Apakah tokoh masyarakat desa terlibat dalam pengelolaan dana desa?
4.	Apakah penggunaan dana desa sudah terlaksana dengan semestinya ?
5.	Kesulitan apa yang dialami dalam mengelola dana desa?
6.	Strategi apa yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut ?
7.	Adakah program pembangunan dana desa yang sudah terlaksana ?
8.	Bagaimana program tersebut dilaksanakan?
9.	Menurut Anda, apakah masyarakat puas dalam program pembangunan tersebut ?

A. KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

No.	Indikator	Sub indikator	Nomor Pertanyaan
3.	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Waringin Jaya	1. Keberadaan dana desa	1
		2. Keterlibatan pengelolaan dana desa	2, 3
		3. Penggunaan dana desa	4
		4. Program pembangunan desa	5, 6, 7

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengantar

- a. Wawancara ini ditujukan kepada masyarakat Desa Waringin Jaya yang membantu Kepala Desa dalam mengelola dana desa guna melaksanakan pembangunan. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya. Informasi yang diberikan oleh narasumber sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar S1.
- b. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari kegiatan wawancara semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian.
- c. Informasi yang diberikan oleh narasumber tidak akan mempengaruhi nama baik narasumber itu sendiri.

2. Petunjuk Wawancara

- a. Wawancara semi terstruktur.
- b. Selama kegiatan wawancara berlangsung peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan wawancara kondisional, dimana dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilapangan hingga diperoleh data yang valid.

3. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Waktu wawancara :
- d. Lokasi wawancara :

No	Pertanyaan
1.	Apakah masyarakat desa terlibat dalam pengelolaan dana desa?
2.	Adakah program pembangunan dari dana desa yang sudah terlaksana?
3.	Bagaimana program tersebut dilaksanakan?
4.	Apakah masyarakat terlibat dalam pembangunan Desa Waringin Jaya?
5.	Apakah masyarakat puas dengan program pembangunan tersebut?
6.	Apakah harapan masyarakat setelah adanya pembangunan tersebut?
7.	Adakah perencanaan selanjutnya dari masyarakat untuk membangun desa Waringin Jaya?

C. OBSERVASI

1. Kisi-Kisi Instrumen Observasi

No.	Indikator	Sub Indikator	Nomor Item
1.	Transparan	Keterbukaan pemerintah	1
		Keterbukaan lingkungan masyarakat	2
2.	Partisipasi	Pengambilan keputusan	3
		Kebebasan berpendapat	4
		Aspirasi masyarakat	5
3.	Akuntabilitas	Laporan pertanggung jawaban	6

2. Pedoman Observasi

1) Petunjuk Observasi

- a. Peneliti dalam penelitian ini tidak menjadi bagian objek yang diteliti.
- b. Selama kegiatan penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil observasi.
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan observasi dalam penelitian ini bersifat kondisional, yang mana dapat berubah sesuai situasi dan kondisi yang terdapat di lapangan pada saat penelitian berlangsung, hingga peneliti benar-benar memperoleh data yang diinginkan.

2) Lembar Observasi

- a. Observasi pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Waringin Jaya.

No	Bentuk Aktivitas Yang Diamati	Hasil Observasi	
		Tampak	Belum Tampak
1.	Keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan dana desa		
2.	Keterbukaan pengelolaan dana desa dalam lingkungan masyarakat		
3.	Pengambilan keputusan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di bidang pembangunan		
4.	Kebebasan masyarakat dalam berpendapat mengenai penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan		
5.	Aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan		
6.	Bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengelolaan dana desa yang ditunjukkan oleh Kepala Desa		

Pensekoran dalam lembar observasi menggunakan skala *likert rating scale*, yaitu sebagai berikut:

Indikator Penilaian	Favorable	Unfavorable
Tampak	2	1
Belum Tampak	1	2

D. DOKUMENTASI

1. Pedoman Dokumentasi

1) Petunjuk Pelaksanaan

- a. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian.
- b. Dokumentasi dalam penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu metode untuk mengumpulkan data-data yang dapat menunjang topik yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Waktu pelaksanaan dokumentasi dapat berubah sesuai dengan keadaan yang terdapat di lapangan pada saat penelitian, sampai peneliti memperoleh data yang diinginkan.

2) Lembar Dokumentasi

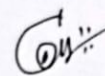
No	Dokumen yang dicari	Hasil Dokumentasi	
		Ada	Tidak Ada
1.	Sejarah Desa Waringin Jaya		
2.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Waringin Jaya		
3.	Jumlah Penduduk Desa Waringin Jaya		
4.	Profesi Penduduk Desa Waringin Jaya		
5.	Data Pembangunan Desa Waringin Jaya		
6.	Kegiatan Pembangunan Desa Waringin Jaya		

Pembimbing



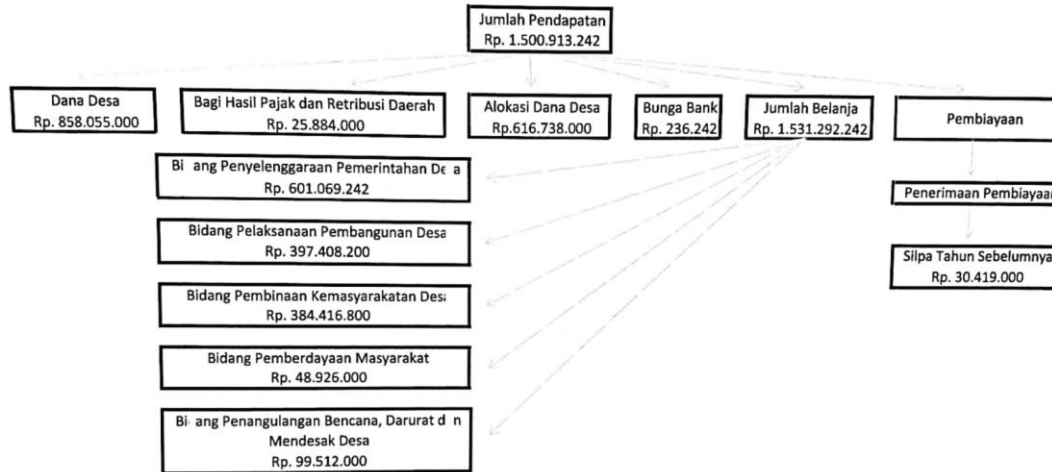
Dr. Tusrivanto, M.Pd
NIP. 197308102006041001

Metro, 01 Februari 2023
Peneliti,

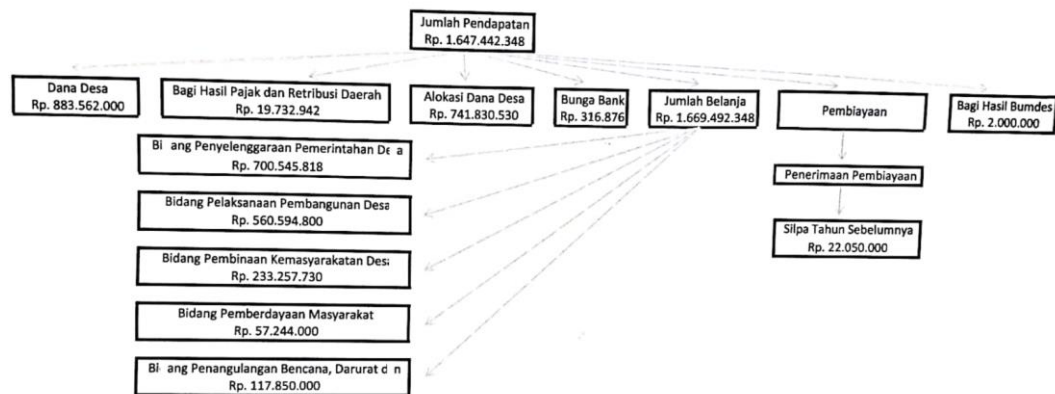


AYU ANITA SARI
NPM. 1901071010

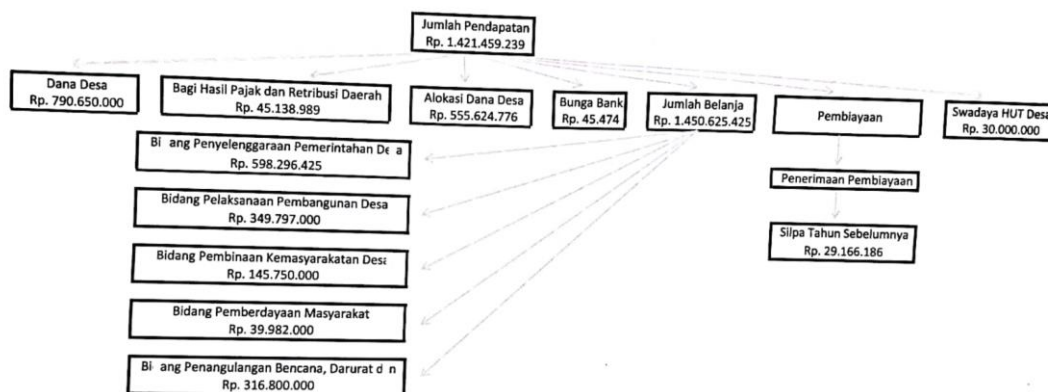
Lampiran 2: Bagan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020



Lampiran 3: Bagan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021



Lampiran 4: Bagan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022



Lampiran 5: Pembangunan Desa Tahun 2020
Pembangunan Balai Desa



Pembangunan Podium / Ruang Ganti



Pembangunan *Paving Block* dan *Jogging Track*



Pembangunan Sumur Bor



Pembangunan Lapangan Volly



Lampiran 6: Pembangunan Desa Tahun 2021

Rehab Balai Desa Lanjutan



Pembukaan Badan Jalan



Gorong-gorong / jembatan Desa



Sarana Sorga Desa



Lampiran 7: Pembangunan Desa Tahun 2022

Pembukaan badan jalan

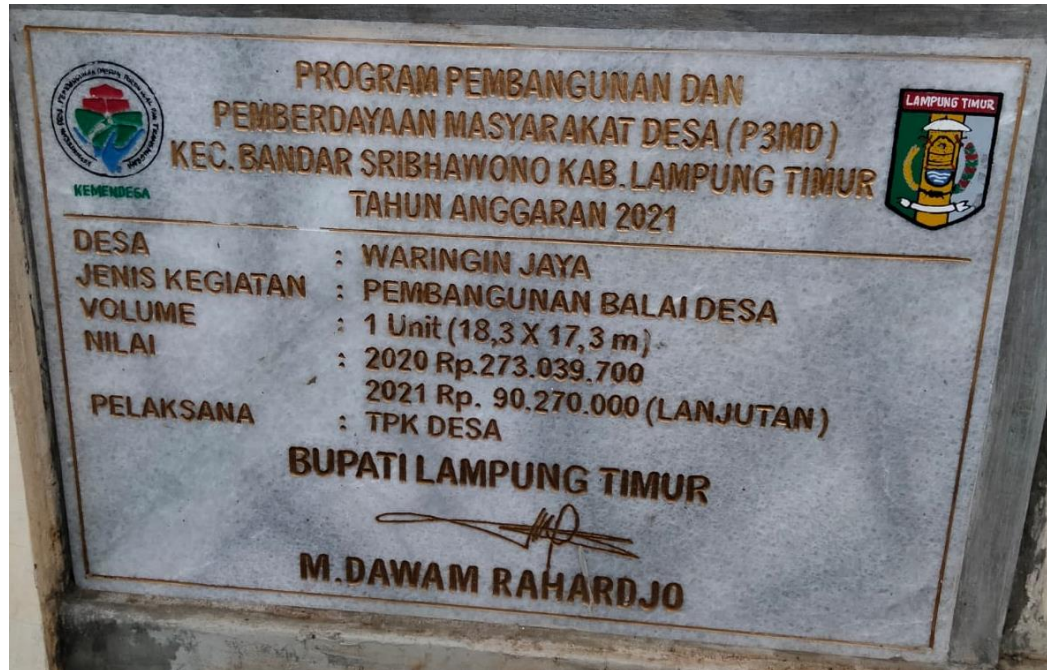


Jembatan Desa



Lampiran 8: Prasasti-Prasasti Pembangunan Tahun 2020

Prasasti Rehab Balai Desa Dusun 1



Prasasti Pembangunan Paving Block dan Jogging Track Dusun 1



Prasasti Pembangunan Podium Dusun 1



Prasasti Pembangunan Sumur Bor Dusun 3



Prasasti Pembangunan Lapangan Volly Dusun 1

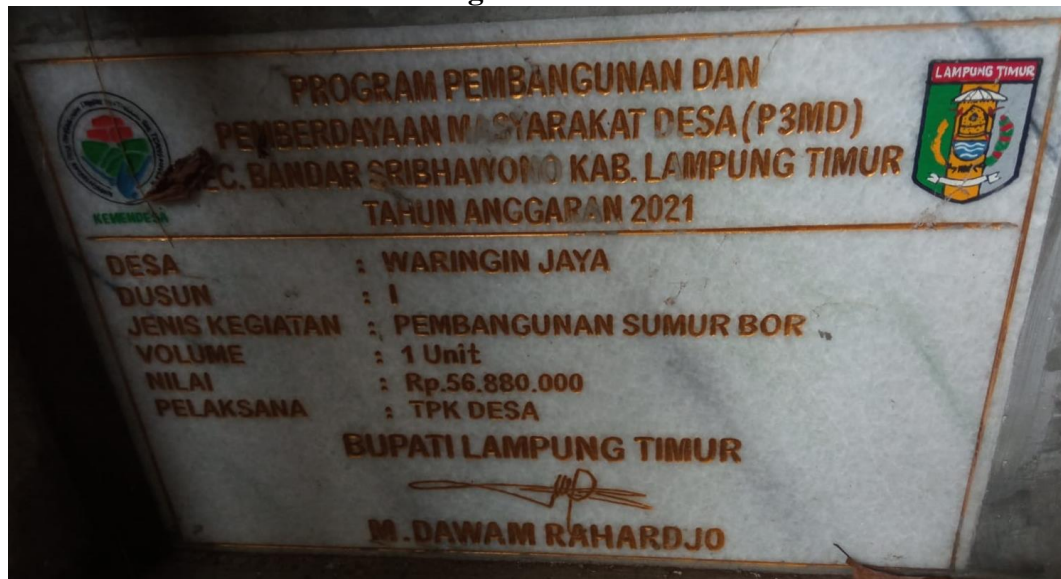


Lampiran 9: Prasasti-Prasasti Pembangunan Tahun 2021

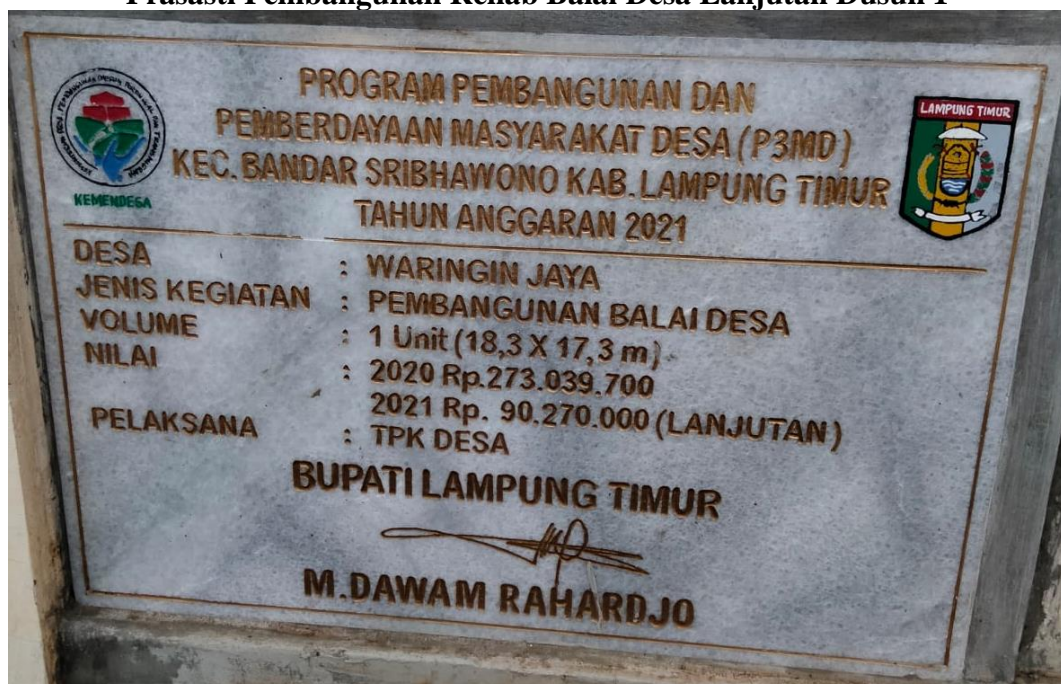
Prasasti Pembangunan Badan Jalan Dusun 4 dan 5



Prasasti Pembangunan Sumur Bor Dusun 1



Prasasti Pembangunan Rehab Balai Desa Lanjutan Dusun 1



Prasasti Pembangunan Gorong-Gorong Dusun 1, 2, 3, Dan 4



Prasasti Pembangunan Sarana Sorga dan Lampu



Lampiran 10: Prasasti-Prasasti Pembangunan Tahun 2022

Prasasti Pembangunan Badan Jalan Dusun 1 dan 2



Prasasti Pembangunan Jembatan Desa Dusun 4



Lampiran 11: Wawancara Dengan Sekertaris Desa**Lampiran 12: Wawancara Dengan Kepala Dusun 1**

Lampiran 13: Wawancara Dengan Kepala Dusun 3



Lampiran 14: Wawancara Dengan Anggota LPM



Lampiran 15: Wawancara Dengan Masyarakat

Lampiran 16: Surat Izin Prasurvey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2528/In.28/J/TL.01/06/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA WARINGIN JAYA,
KECAMATAN BANDAR
SRIBHAWONO, K
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **AYU ANITA SARI**
NPM : 1901071010
Semester : 6 (Enam)
Jurusan : Tadris IPS
Judul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN
JAYA

untuk melakukan prasurvey di DESA WARINGIN JAYA, KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO, K, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Juni 2022

Ketua Jurusan,



**Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma
M.Pd**

NIP 19880823 201503 1 007

Lampiran 17: Surat Balasan Prasurvey



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
DESA WARINGIN JAYA

Alamat : Dusun 1 Rt.004 Rw.002 Desa Waringin jaya Kec Bandar sribhawono Kab. Lam Tim Kode Pos 34199

Nomor :

Lamp :-

Hal : **SURAT BALASAN IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth,

REKTOR/DEKAN

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Di-

Tempat

Menindak Lanjuti Dasar Surat dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-2528/In.28/J/TLK.01/06/2022 Tanggal 14 Juni 2022 , Perihal Tentang Izin Prasurvey dengan ini Kepala Desa waringin Jaya Kecamatan bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Menyetujui /Mengijinkzn :

Nama	: AYU ANITA SARI
NPM	: 1901071010
Semester	: 7 (tujuh)
Jurusan	: Tadris IPS
Judul	: Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya

Untuk Melakukan Prasurvey Di Desa Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur , dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir /Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Demikian Surat Izin Pra-Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Di buat di : Waringin Jaya

Pada Tanggal : 06 Desember 2022

KEPALA DESA WARINGIN JAYA



Lampiran 18: Surat Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1054/In.28.1/J/TL.00/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Dr. Tusriyanto, M.Pd. (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **AYU ANITA SARI**
NPM : 1901071010
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Tadris IPS
Judul : **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Maret 2023
Ketua Jurusan,



**Tubagus Ali Rachman Puja
Kesuma M.Pd**

Lampiran 19: Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725); faksimili (0725) 47296; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama Mahasiswa : Ayu Anita Sari Jurusan : Tadris IPS
 NPM : 1901071010 Semester/TA : 8

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 21/2023 Feb	Dr. Tusnyanto, M.pd.	1. Cover dan kata pengantar diubah menjadi "SKRIPSI". 2. Daftar isi ditambah tulisan "halaman". 3. Latar belakang masalah * Objek yang diteliti Selama 3 tahun terakhir * munculkan Persentase Perbidang	

Mengetahui
Ketua Jurusan

NIP.

Dosen Pembimbing

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725); faksimili (0725) 47296; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama Mahasiswa : Ayu Anita Sari Jurusan : Tadris IPS
 NPM : 1901071010 Semester/TA : 8

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
2	Selasa, 23/2023 Feb	Dr. TUSFIYANTO, M.Pd.	Kisi ² lembar wawancara Kisi ² lembar observasi dll.	
3.	Rabu, 01/2024 Maret		- observasi menggunakan Skala Likert - Indikator observasi - aspek aspek lembar observasi, wawancara & jurnal	

Mengetahui
Ketua Jurusan

NIP.

Dosen Pembimbing

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725); faksimili (0725) 47296; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama Mahasiswa : Ayu Anita sari Jurusan : Tadris IPS
 NPM : 1901071010 Semester/TA : 8

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
4.	Rabu, 15/23 /03	Tusriyanto	Tata Penulisan APD Pendahuluan	
5.	Selasa, 21/23 /03	Dr. Tusriyanto M. Pd.	penulisan daftar pustaka dan Daftar Isi	

Mengetahui
Ketua Jurusan

NIP.

Dosen Pembimbing

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725); faksimili (0725) 47296; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama Mahasiswa : Ayu Anita sari Jurusan : Tadris IPS
 NPM : 1901071010 Semester/TA : 8

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
C.	Selasa, 28/03 /03	Dr. Tuti Harto M.Pd.	Atc Bab 123 lap & outline	

Mengetahui
 Ketua Jurusan

NIP.

Dosen Pembimbing

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725); faksimili (0725) 47296; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama Mahasiswa : Ayu Anita Sari Jurusan : Tadris IPS
 NPM : 19101071010 Semester/TA : 8

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 17/2023 /05	Dr. Tusriyanto, M.Pd.	penelitian Al-STR	
2.	Selasa, 27/23 /05	Tusriyanto	penelitian prodi di fak W dan berikan keterangan	

Mengetahui
 Ketua Jurusan

NIP.

Dosen Pembimbing

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725); fksimili (0725) 47296; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Nama Mahasiswa : Ayu Anita Sari Jurusan : Tadris IPS
 NPM : 190071010 Semester/TA : 8

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
3.	24/27 15	Tusniyanto	Acc Bab 1-5 saya di Menggodha	

Mengetahui
 Ketua Jurusan

NIP.

Dosen Pembimbing

NIP.

Lampiran 20: Surat Izin Research



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1429/In.28/D.1/TL.00/03/2023
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA WARINGIN JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1430/In.28/D.1/TL.01/03/2023, tanggal 28 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama : **AYU ANITA SARI**
NPM : 1901071010
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Tadris IPS

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA WARINGIN JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Maret 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dra. Isti Fatonah MA
NIP 19670531 199303 2 003

Lampiran 21: Surat Tugas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1430/In.28/D.1/TL.01/03/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AYU ANITA SARI**
NPM : 1901071010
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Tadris IPS

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA WARINGIN JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dra. Isti Fatonah MA
NIP 19670531 199303 2 003

Lampiran 22: Surat Balasan Research



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
DESA WARINGIN JAYA**

Alamat : Dusun 01 Rt.004 Rw.002 Desa Waringin Jaya, Kec. Bandar Srihawono, Kab. Lampung Timur

Kode Pos : 34199

Nomor : 005 / 47 / 15.2005 / V / 2023
Lamp :-
Hal : SURAT BALASAN IZIN RESEARCH

Kepada Yth,
REKTOR / DEKAN
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Di-
Tempat

Menindak lanjuti Dasar Surat dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor :B-1429/In.28/d.1/TL.00/03/2023 Tanggal 28 Maret 2023,Perihal Tentang Izin Research/Survey Dengan ini Kepala Desa Waringin Jaya Kecamatan Bandar Srihawono Kabupaten Lampung Timur Menyetujui /Mengijinkan :

NAMA : AYU ANITA SARI
NPM : 1901071010
SEMESTER : 8 (Delapan)
JURUSAN : Tadris IPS
JUDUL : Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya

Untuk melakukan Research/Survey Di Desa Waringin Jaya Kecamatan Bandar Srhbawono Kabupaten Lampung Timur,dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi Pada Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Demikian Surat Balasan Izin Research/Survei ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Waringin Jaya, 03 Mei 2023
KEPALA DESA WARINGIN JAYA

SRI WAHYUNI SE
197505052010012018

Lampiran 23: Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-414/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AYU ANITA SARI
NPM : 1901071010
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ IPS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1901071010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

Lampiran 24: Hasil Turnitin

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA

by Ayu Anita Sari Npm. 1901071010

Submission date: 28-May-2023 07:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 2103312417

File name: SKRIPSI_BAB_1,2,3,4,5_-_AYU_ANITA_SARI_ACC_1.docx (5.41M)

Word count: 12632

Character count: 82046

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unibos.ac.id Internet Source	4%
2	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
3	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
8	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	1%
9	Abdul Hendriyanto Wahyono, Anggraeni Fattah. "PERAN ALOKASI DANA DESA BAGI	1%

Metro 30 Mei 2023
Mengetahui,

Anita Lisdiana, M.Pd
NIP.19930821 201903 2 020

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 DESA KAJAR TENGUULI KECAMATAN
 PRAMBIN KABUPATEN SIDAORJO",
 Bharanomics, 2020
 Publication

10	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1 %
12	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
13	aminjaya.desa.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Meja 30 Mei 2023
 SEWA
 Anita Lisdiana, M.Pd
 NIP. 19930821 201903 2 020

RIWAYAT HIDUP



Ayu Anita Sari adalah nama peneliti skripsi. Peneliti merupakan putri bungsu dari dua bersaudara, pasangan dari Bapak Sumarno dan Ibu Romiatin. Peneliti dilahirkan di Desa Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 10 September 2001.

Peneliti menempuh pendidikan di mulai dari TK PGRI Waringin Jaya (lulus pada tahun 2006), SDN Waringin Jaya (lulus pada tahun 2013), melanjutkan ke SMP Buana Bandar Sribhawono (lulus pada tahun 2016), dan SMAN 1 Bandar Sribhawono (lulus pada tahun 2019), dan melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Metro hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Tadris IPS. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan peneliti tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.